



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu memastikan keadilan dalam akses pangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan...

dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- (2) RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bab I, pendahuluan;
 - b. Bab II, rencana aksi multisektor;
 - c. Bab III, kerangka pelaksanaan rencana aksi;
 - d. Bab IV, pemantauan dan evaluasi;

e. Bab...

e. Bab V, penutup.

- (2) Dokumen RAD-PG dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 2



LAMPIRAN...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada kualitas SDM yang sehat yang produktif. Upaya mewujudkannya adalah dengan pendekatan multisektor yang terintegrasi melalui koordinasi program dan kegiatan direncanakan sehingga pencapaian tujuan pembangunan pangan dan gizi dapat dilakukan secara efektif dan berdaya saing dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Perhatian khusus Pemerintah Daerah pada stunting merupakan komitmen bersama pembangunan pangan dan gizi secara luas dilaksanakan dan sebagai tindak lanjut daripada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Dokumen RAD-PG memuat kebijakan strategis pangan dan gizi, indikator outcome dan targetnya, indikator kinerja (output) atas program dan kegiatan ditetapkan oleh pelaksana program RAD-PG.

Pembangunan pangan dan gizi merupakan investasi strategis jangka panjang yang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia serta menjawab isu-isu pembangunan yang mengarah pada pendekatan sistem yang terintegrasi (multisektor) sehingga program pembangunan juga dapat dilakukan secara keberlanjutan.

Pembangunan pangan dan gizi khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu sejak janin sampai anak berusia dua tahun yang, merupakan kesempatan emas pertumbuhan dan perkembangan manusia yang optimal menurut Lancet (2013), pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi serta kelembagaan. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh, kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, perlindungan anak, perubahan iklim, potensi daerah dan juga aspek-aspek lainnya baik bersifat sensitif maupun spesifik.

Aspek ketahanan pangan khususnya ketersediaan memegang peran penting dalam pembangunan pangan dan gizi. Aspek ini dipengaruhi oleh potensi daerah dan perubahan iklim yang berdampak sangat besar terhadap produksi. Selain itu, infrastruktur juga berperan penting terhadap pemerataan distribusi pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam sampai level individu menjadi bagian dalam pembangunan ketahanan pangan. Akses dan penggunaan pangan merupakan input dalam pembangunan gizi yang baik bagi masyarakat.

Tingginya akses pangan didorong oleh adanya kapasitas daya beli, tingkat

kemiskinan, sedangkan dalam aspek utilitas pangan, pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi menjadi unsur utama bagi peningkatan status gizi di masyarakat. Keduanya merupakan kombinasi dari 2 (dua) sisi pembangunan pangan dan gizi sekaligus, yaitu pendekatan dari sisi *supply* dan pendekatan dari sisi *demand*.

Aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam rencana aksi pangan dan gizi. Namun demikian, proses pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk juga peran serta masyarakat. Aspek kesehatan ini merupakan *outcome* yang diharapkan dengan adanya rencana aksi daerah pangan dan gizi. Hal ini juga sejalan dengan motto *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu "*No One Left Behind*" yang artinya tidak ada yang ketinggalan dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai sektor saling bersinergi dalam program, kegiatan dan implementasinya.

Oleh karena itu, seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi dan bersinkronisasi program kegiatan sehingga tercapai ketahanan pangan dan gizi dan angka stunting dapat diturunkan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) periode 2025 - 2029 merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan pangan dan gizi dan untuk mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pendekatan Multi-sektor dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi periode 2025 - 2029 melibatkan Perangkat Daerah berpartisipasi dan mensinergikan program kegiatannya dalam rangka perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan. Koordinasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk pencapaian target yang ditetapkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, keterlibatan instansi yang berkaitan dengan intervensi langsung maupun tidak langsung perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan pangan dan gizi baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan pangan yang nantinya berdampak pada status gizi individu yakni :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Dinas Perikanan;
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;
9. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
10. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
14. Dinas Lingkungan Hidup;

Peranan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan pangan dan gizi :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan peningkatan produksi dan produktifitas untuk menyokong ketersediaan pangan.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan distribusi, keterjangkauan pangan dan keamanan pangan.
3. Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan penanganan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penjaminan kesehatan dan keamanan pangan.
4. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan bekerja sama dengan BBPOM merupakan Perangkat Daerah yang menangani program-program yang berkaitan dengan pengawasan pangan, sertifikasi barang, inspeksi pangan dan pengembangan perdagangan.
5. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam menerima dan mengolah informasi sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan Pengetahuan pangan dan gizi, sosialisasi pendewasaan usia pernikahan.
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan pekerjaan umum yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih, perbaikan dan penyediaan akses pangan secara fisik serta sanitasi yang layak.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam pembangunan pangan dan gizi melalui perbaikan akses pangan masyarakat utamanya dengan peningkatan pendapatan dan daya beli.
9. Dinas sosial merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan Peningkatan daya beli bagi masyarakat yang kurang mampu dilakukan melalui program keluarga harapan.
10. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informasi dan Telekomunikasi, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, dan Kantor Urusan Agama merupakan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan terkait dengan pendidikan pasangan calon pengantin.

Program kegiatan yang telah dirumuskan dalam (RPJMD) dan rencana strategis PD, rencana aksi daerah pangan dan gizi berperan mensinergikan dan mentapkan aksi daerah dalam pemenuhan dan peningkatan pangan dengan dampak yang diharapkan terjadi perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, diversifikasi pangan, peningkatan aspek mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan peningkatan kinerja koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

Dokumen ini menjadi sangat penting mensinergikan program kegiatan perangkat daerah terkait sehingga sinergi dalam meningkatkan pangan dan gizi masyarakat. Partisipasi aktif PD dan peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

1.2. Tujuan Penyusunan RAD-PG

Penyusunan dokumen RAD-PG Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai acuan dan arahan yang harus dilaksanakan oleh PD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pihak lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Lamongan.

Tujuan khusus penyusunan RAD-PG Tahun 2025-2029 Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
3. Memberikan panduan bagi pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan
4. Memberikan panduan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi pendekatan multisektor.

BAB II

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

2.1 Indikator dan Sasaran Pangan dan Gizi

2.1.1 Indikator dan Sasaran Pangan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Secara khusus rencana aksi multisektor dalam implelementasi intervensi pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Lamongan periode 2024-2029, adalah:

1. Peningkatan efektifitas program dalam peningkatan gizi masyarakat;
2. Penguatan efek pembangunan pada ketersediaan dan kemandirian pangan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan kemantapan dan keberlanjutan aksesibilitas pangan dan penganekaragaman konsumsi;
4. Peningkatan pengawasan Mutu dan keamanan pangan secara lebih komprehensif;
5. Peningkatan nilai tambah dan bisnis pangan yang membawa multiplier pada penguatan keamanan dan diversifikasi pangan bagi masyarakat Jawa Timur;
6. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS);
7. Penguatan kelembagaan pangan dan Gizi.

Sedangkan sasaran dari RAD-PG Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Timur adalah perbaikan pangan dan gizi masyarakat sehingga mampu menurunkan angka stunting secara berkelanjutan melalui sinergisme antar Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Lamongan dan diharapkan mampu mencapai target RAD-PG secara efektif dan efisien.

Sasaran rencana aksi multisector dalam aspek pangan secara rinci disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Indikator dan Sasaran Pangan Kabupaten Lamongan 2025 – 2029

Indikator	Satuan	Dasar 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan Energi	KKal/ka p/hari	2357	2357	2400	2400	2400	2400
Ketersediaan Protein	Gr/kap/hari	62	62	63	63	63	63
Ketersediaan Produksi pangan utama (beras) thd konsumsi	%	1,19	1,19	1,2	1,2	1,21	1,22
Produksi padi	Ribu Ton	1,15	1,20	1,23	1,25	1,27	1,30
Produksi Jagung	Ribu ku	17,67	17,77	17,87	17,97	18	18
Produksi Kedelai	Ribu Ton	10,55	10,55	10,55	10,65	10,65	10,75
Produksi Gula	Ribu Ton	27,29	27,29	27,29	27,29	27,29	27,30

Indikator	Satuan	Dasar 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produksi Daging Sapi	Ribu Ton	1,28	1,28	1,30	1,31	1,34	1,36
Produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	Ribu Ton	28,34	28,44	28,54	28,64	28,74	28,84
Produksi Garam	Ribu Ton	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34
Angka Kecukupan Energi	Kkal/ka p/hari	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Angka Kecukupan Protein	Gr/kap/hari	57	57	57	57	57	57
Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/tahun	38,62	40	42	44	46	48,96
Pola Pangan Harapan	Skor PPH	87,7	87,70	88,80	89,90	90,00	91,10
Konsumsi kalori	kcal/kap/hari	11,94	12	12,1	12,3	12,5	12,8

*data yang diolah, Bapperida 2025

2.1.2 Indikator dan Sasaran Gizi

Selain sasaran pangan, sasaran pembangunan gizi masyarakat juga mendapatkan perhatian penting.

Berikut sasaran-sasaran tentang perbaikan gizi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Indikator dan Sasaran Gizi Kabupaten Lamongan 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DASAR 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Balita dengan Berat Badan Kurang	%	10.1	9.6	9.1	8.6	8.5	7.6
2	Balita dengan Berat Badan Sangat Kurang	%	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
3	Balita Wasting (Kurus dan sangat Kurus)	%	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0
4	Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	%	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5
5	Balita Stunting	%	32.81	28.0	26.0	24.0	22.0	20.0
6	Angka Kematian Bayi	1000	22.46	22.10	21.50	21.00	20.50	20.00
7	Persentase ASI Eksklusif > 50%	Jumlah Kab/Kota	36	36	37	38	38	38
8	Persentase Anemia Ibu Hamil	%	28.0	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0
9	Persentase Badan Lebih dan Obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21.8	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4

2.2 Prinsip dan Pendekatan Kunci

RAD-PG disusun sebagai upaya harmonisasi dan integrasi program kerja antar perangkat daerah terkait pangan dan gizi. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan

efektifitas program pembangunan khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan peningkatan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Lamongan mempertimbangkan lima pilar, yaitu:

- a. Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:
 1. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat
 2. Pemberian suplementasi gizi
 3. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi
 4. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi
 5. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi
 6. Pendidikan anak usia dini
- b. Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:
 1. Produksi pangan
 2. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
 3. Distribusi pangan
 4. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein dan vitamin
 5. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi
- c. Pilar 3 - Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:
 1. Pengawasan regulasi dan standar gizi;
 2. Pengawasan keamanan pangan segar;
 3. Pengawasan keamanan pangan olahan;
 4. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum;
 5. Promosi keamanan pangan;
- d. Pilar 4 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:
 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
 3. Penyediaan air bersih dan sanitasi
 4. Penerapan kawasan tanpa rokok
 5. Penerapan perilaku sehat
- e. Pilar 5 - Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:
 1. Perencanaan pangan dan gizi
 2. Penguatan peranan lintas sektor
 3. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi
 4. Pemantauan dan evaluasi
 5. Penyusunan dan penyampaian laporan

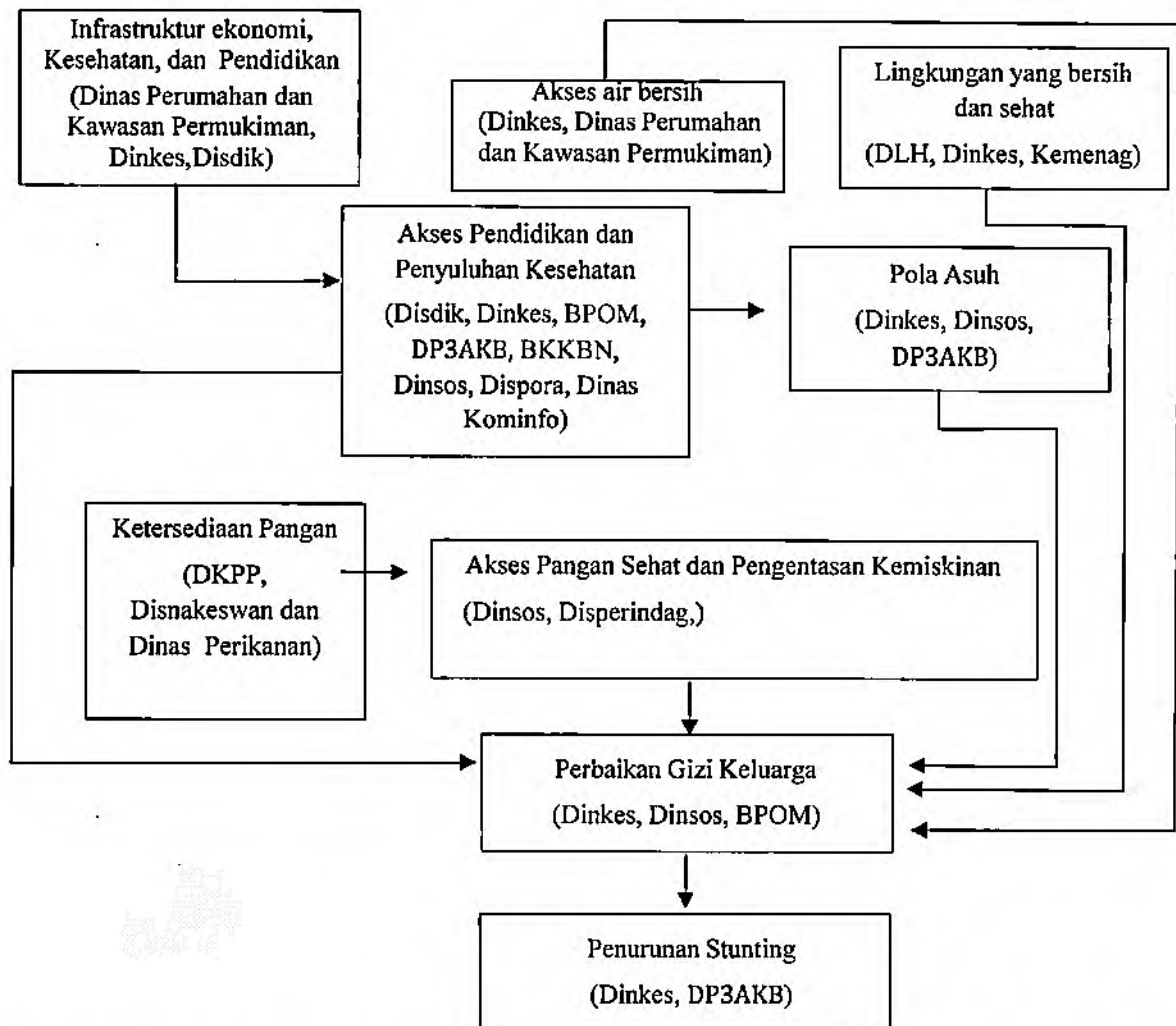
Lima pilar di atas merupakan referensi utama dalam perencanaan dan implementasi RAD-PG di Kabupaten Lamongan. Perbaikan terhadap akses pangan yang bergizi, aman dikonsumsi, dan ditunjang dengan pola hidup yang sehat merupakan bidang intervensi dalam dokumen RAD-PG. Implementasi intervensi selanjutnya didasarkan pada perencanaan yang relevan, jelas, dan terukur, implementasinya berdasarkan pada prinsip partisipatif dan kolaboratif dari berbagai sektor yang terlibat.

Sinkronisasi program antar Perangkat Daerah menjadi mutlak dilakukan, selain itu

sinkronisasi dokumen RAD-PG dengan perencanaan daerah juga merupakan bagian penting lainnya.

Berikut adalah logical framework keterkaitan Perangkat Daerah dalam kegiatan perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

Gambar 1. Logical framework RADPG lintas sektor



RAD-PG harus merupakan derivasi dari RPJPD 2024 -2045, RPJMD 2025-2029 dengan visi sebagai berikut, yakni “Mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan.” diterjemahkan melalui lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.
2. Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman.
3. Mewujudkan infrastruktur Daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

RAD-PG juga memiliki peran dalam pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan komoditas unggulan daerah dapat terwujud. Secara rinci agar visi Kabupaten Lamongan dapat terwujud, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pendekatan multisektor merupakan pendekatan yang pada prinsipnya membangun partnership dan kolaborasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah guna meningkatkan efisiensi dan daya ungkit intervensi dalam aspek pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan. Pendekatan multisektor dalam perbaikan pangan dan gizi sangat diperlukan, hal ini disebabkan perbaikan melalui gizi yang telah dilakukan sektor kesehatan tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah pangan dan gizi. Sektor yang lain dibutuhkan untuk intervensi sektor non kesehatan, baik di sektor penguatan pertanian, perlindungan sosial, perbaikan air, ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, maupun melalui program keluarga berencana.

Khusus berkaitan dengan stunting, apabila intervensi spesifik gizi, melalui upaya sektor kesehatan, ditingkatkan cakupannya menjadi 90 (sembilan puluh) persen dari populasi, tingkat stunting hanya akan turun sebesar 30 (tiga puluh) persen. Meningkatkan intervensi sensitif gizi melalui sektor lainnya sangat diperlukan untuk mencapai target ini. Meskipun belum ada bukti yang menghitung estimasi secara tepat kontribusi intervensi gizi sensitif terhadap pengurangan stunting, indikasi awal menunjukkan bahwa perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan berkontribusi terhadap percepatan perbaikan gizi (Franzo, 2014). Dengan demikian, disadari baik secara nasional maupun global bahwa ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Aspek distribusi, akses pangan dan pengetahuan tentang pangan dan gizi serta pemanfaatannya sendiri sangat mempengaruhi bagaimana makanan ini sampai di tangan rumah tangga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.

Mendasarkan pada 5 (lima) pilar dan pendekatan multisektor, maka dalam penyusunan RAD-PG Kabupaten Lamongan 2025 - 2029 mengacu pada upaya-upaya yaitu penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk, stunting, anemia pada ibu hamil, IMR, AHH, juga indeks kesehatan masyarakat, ketersediaan dan akses pangan yang cukup, bermutu, bergizi dan berimbang, serta perubahan perilaku masyarakat untuk

dapat hidup bersih dan sehat.

Pencapaian baik aspek kesehatan maupun non-kesehatan yang berpengaruh positif pada perbaikan pangan dan gizi dilakukan secara bertahap dan melalui keluaran yang terukur, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemberian ASI eksklusif bagi balita
2. Meningkatkan akses dan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi balita
3. Meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
4. Meningkatnya industri makanan dan minuman yang menerapkan GMP (Good Manufacturing Practices)
5. Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan pangan rumah tangga (PIRT) tersertifikasi
6. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang melakukan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS)
7. Meningkatnya kemandirian pangan wilayah dengan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang berkelanjutan melalui penerapan GAP (Good Agricultural Practices).
8. Meningkatnya daya dukung wilayah untuk hidup sehat dengan lingkungan yang bersih, ketersediaan air bersih bagi seluruh warga, dan ketertiban lingkungan.

Upaya peningkatan pangan dan gizi masyarakat bukanlah usaha mudah yang hanya membutuhkan dana yang cukup untuk intervensi melalui program dan kegiatan. Pembangunan pangan dan gizi secara berkelanjutan adalah upaya komprehensif yang melibatkan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih memperhatikan dan terbiasa dengan hidup secara sehat dan bersih.

Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pangan dan gizi, yaitu:

1. Sosial dan Budaya: kemiskinan, pendidikan, persepsi hak asasi manusia, pemberdayaan keluarga dan kesetaraan gender, persepsi kesehatan reproduksi, keamanan makanan, kepercayaan dan perilaku yang bertentangan dengan pola hidup sehat.
2. Sistem pangan dan gizi: sumberdaya manusia, infrastruktur, pembiayaan, implementasi standar pelayanan minimal, ketahanan pangan terkait dengan climate change, kewaspadaan pangan dan gizi terkait dengan kemiskinan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, koordinasi dan kemitraan, penelitian pangan dan gizi termasuk kurang zat gizi mikro.
3. Koordinasi lintas sektor demi efektifitas kinerja program memerlukan komitmen masing-masing Perangkat Daerah untuk bersama-sama mengarah pada perbaikan pangan dan gizi.

Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya yang terlibat dan memiliki peran dalam pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Lamongan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Kelembagaan dan Perannya dalam Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Lamongan

No.	Lembaga	Peran
1.	Dinas Kesehatan	1. Promosi dan kampanye 1000 HPK, ASI eksklusif dan pedoman gizi seimbang, serta pemantauan berat badan pada anak dan remaja 2. Pelatihan tenaga kesehatan dan kader posyandu tentang 1000 HPK, tumbuh kembang anak, status gizi prahamil dan saat hamil, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif 3. Edukasi gizi saat pemeriksaan ANC 4. Penyebaran media KIE gizi di fasilitas kesehatan dan sekolah (pelibatan kominfo) 5. Sosialisasi pemberian makan balita 6. Intensifikasi penggunaan informasi yang ada pada kartu menuju sehat 7. Standarisasi pengetahuan gizi bagi tenaga gizi 8. Suplementasi tablet besi-folat/MMS bagi ibu hamil dan remaja putri 9. Suplementasi vitamin A pada anak 10. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui penimbangan di posyandu dan pengisian kartu menuju sehat 11. Melakukan penatalaksanaan kasus gizi buruk akut 12. peningkatan cakupan Peserta JKN Kesehatan 13. Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 14. Edukasi penerapan PHBS 15. Peningkatan peran kader posyandu 16. Penggunaan jamban sehat dan penggunaan air bersih) 17. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 18. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal 19. Imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan anak 20. Fortifikasi garam beryodium 21. PMT pada ibu KEK 22. Surveilans dan skrining gizi 23. Memasyarakatkan olahraga dengan promosi, edukasi dan dukungan untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup sehingga mencapai keseimbangan energi
2.	Dinas Pendidikan	1. Aktivasi program PMR, dokter kecil 2. Edukasi dan promosi terkait jajanan sehat 3. Pembenahan kantin sekolah dan aturan terkait jajan di luar sekolah 4. Menggalakkan kembali program kebun sekolah Wajib belajar 12 tahun 5. Pelatihan gizi dan tumbuh kembang anak bagi guru 6. Program kecakapan hidup perempuan dan keayahanbundaan 7. Program makan bergizi gratis
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Penerapan teknologi budidaya pertanian yang baik dan ramah lingkungan 2. Peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) 3. Peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman hortikultura (cabe, tomat, bawang merah, sayur dll) 4. Peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian

		5. Pengendalian OPT 6. Peningkatan kualitas hasil produksi pertanian 7. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian 8. Pembinaan kelompok tani 9. Promosi dan kampanye dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan sehingga terjadi diversifikasi konsumsi pangan 10. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal 11. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal 12. Fortifikasi Pangan (beras) 13. Peningkatan dan pengembangan lumbung pangan daerah dan masyarakat 14. Pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan 15. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, diantaranya melalui Program Kawasan Pangan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 16. Promosi dan kampanye terkait diversifikasi pangan 17. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan 18. Diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal
4.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Peningkatan populasi ternak 2. Peningkatan produksi daging 3. Peningkatan produksi susu 4. Peningkatan produksi telur 5. Peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana peternakan 6. Peningkatan nilai tambah hasil peternakan dan pemasarannya 7. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan peternak 8. Pembinaan kelompok ternak 9. Pengendalian PHMS (penyakit hewan menular strategis) dan zoonosis
5.	Dinas Perikanan	1. Peningkatan produksi ikan budidaya 2. Peningkatan produksi ikan tangkap 3. Pembinaan peningkatan kapasitas petani dan nelayan 4. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perikanan 5. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan memfasilitasi pemasaran
6.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1. Menjamin ketersediaan pangan di pasar 2. Memantau stabilitas harga bahan pangan 3. Melakukan operasi pasar 4. Dukungan terhadap industri pangan dan makanan 5. Regulasi terkait fortifikasi 6. Pembinaan dan pengembangan industri makanan dan minuman 7. Standarisasi kualitas produk makanan dan minuman
7.	Dinas Sosial	Pelaksanaan program peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Balita Terlantar melalui pelayanan panti
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pembangunan Saluran PAM ke rumah tangga 2. Pembangunan infrastruktur limbah
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Peningkatan kualitas be-KB Pembinaan keluarga sejahtera 2. Mengkampanyekan usia kehamilan >18 tahun
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Pengembangan pasar desa 2. Peningkatan akses pangan oleh kelompok miskin

		3. Pemberdayaan usaha produktif 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) 5. Peningkatan akses teknologi tepat guna (TTG)
11.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1. Pengembangan wirausaha baru 2. Pengembangan akses KUMKM terhadap modal, sarana produksi 3. Peningkatan teknologi KUMKM 4. Pembinaan pemasaran KUMKM 5. Peningkatan akses teknologi tepat guna (TTG)
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyebarkan informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pangan dan gizi
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1. Pertemuan advokasi berjenjang, workshop 2. Mempublikasikan dan menyebarkan kebijakan kepada pengambil kebijakan 3. Koordinasi rutin Gernas 1000 HPK di tingkat pusat dan pemantauannya di tingkat daerah 4. Menyusun/memperbaharui regulasi yang memfokuskan 1000 HPK terutama pada kelompok rentan 5. Monitoring pelaksanaan RAD-PG

2.3 Penguatan RAD-PG

RAD-PG perlu dilakukan penguatan untuk menjadi pedoman dan diimplementasikan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi. Penguatan dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit program pada penyelesaian permasalahan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

Beberapa aspek penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan RAD-PG Kabupaten Lamongan adalah:

(1) Penguatan legal aspek RAD-PG, melalui :

- a. Membentuk tim koordinasi di tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas sektor;
- b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati Lamongan;

(2) Penguatan aspek perencanaan dan penganggaran, melalui:

- c. Penyusunan RAD-PG di tingkat Kabupaten;
- d. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
- e. Menyertakan program terkait intervensi gizi sensitif dan spesifik dalam DPA Perangkat Daerah dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya;

(3) Penguatan aspek implementasi, monitoring dan evaluasi.

Penguatan RAD-PG dari aspek legalitas yaitu, terbentuknya tim koordinasi yang terdiri dari lintas sektor dan ditetapkan surat keputusan untuk tim koordinasi. Tim Koordinasi ini terdiri dari tim pengarah dan tim teknis.

Perhatian pada aspek perencanaan adalah terkait dengan penyusunan dokumen RAD-PG yang melibatkan lintas sektor. Sehingga, hal tersebut menjaring partisipasi atau keterlibatan sebanyak-banyaknya baik dari Perangkat Daerah maupun di luar pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pangan dan gizi.

Penguatan RAD-PG dalam aspek implementasi adalah penguatan operasional perencanaan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif dalam pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan. Sosialisasi dan koordinasi kepada setiap pemangku

kepentingan mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat kecamatan adalah kegiatan penting yang harus terus dilakukan dalam implementasi RAD-PG Kabupaten Lamongan. Koordinasi ini diperlukan untuk mencegah ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Fungsi koordinasi ini diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan rutin saat pelaksanaan RAD-PG pada tahun berjalan.

Monitoring dan evaluasi adalah unsur penting dalam setiap pengelolaan program dan intervensi kebijakan pemerintah. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi maka tidak akan dihasilkan perbaikan-perbaikan ke depan karena pengetahuan yang didapat dari pengalaman tidak dapat diperoleh sebagai pengetahuan bersama terkait dengan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

Pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Lamongan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Lamongan kedua, yaitu pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future). Kondisi pangan dan gizi yang baik diharapkan dapat menjadi salah satu factor penting peningkatan kapasitas SDM untuk berkembang dan memiliki progress kualitas yang semakin baik. Selanjutnya, SDM yang semakin baik, sebagai modal utama pembangunan, akan mendinamisasi sektor riil yang berimbas pada peningkatan income, menggerakkan konsumsi lebih baik, dan juga berimplikasi pada investasi dan pertumbuhan daerah.

Di sisi lain, sebagai tantangan seluruh masyarakat Indonesia saat ini salah satunya adalah problem tentang stunting. Kabupaten Lamongan secara khusus memberikan perhatian pada penanggulangan permasalahan stunting baik dalam tindakan preventif maupun kuratifnya. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% (enam koma empat persen) selama periode 5 (lima) tahun, yaitu dari 37,2% (tiga puluh tujuh koma dua persen) (2013) menjadi 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) (2018). Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 48,6% (empat puluh delapan koma enam persen) (2013) menjadi 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen) (2018). Adapun sisanya mengalami masalah gizi lain (Bappenas, 2018). Intervensi gizi spesifik menasar penyebab stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan menemukan beberapa indikator penting diobservasi dengan baik dengan pelayanan gizi konvergen khususnya pada anak 0-23 tahun.

Berikut adalah sektor program, indikator dan persen akses secara nasional.

Tabel 4. Akses Terhadap Pelayanan Gizi Pada Anak 0-23 Bulan

Sektor Program/ Pelayanan	Indikator		Akses (%)
Kesehatan	1	Imunisasi dasar	35.6
Gizi	2	ASI Eksklusif	60.2
	3	Keragaman Makanan	32.5
Air Minum dan Sanitasi	4	Air minum	74.2
	5	Sanitasi	68
Pendidikan	6	Pendidikan Anak Usia Dini	8.4
Pertanian	7	Skor kerawanan pangan	11.9
Proteksi sosial	8	Akta kelahiran	83.1

Sumber: Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan, 2017

Komitmen dan inisiatif pemerintah untuk mencegah stunting diawali dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan Global Scaling-Up Nutrition (SUN) 2011. Hal ini ditandai dengan penyampaian surat keikutsertaan Indonesia oleh Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini diluncurkan tahun 2010 dengan prinsip dasar bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi (Bappenas, 2018).

Riskesdas juga mengungkap bagaimana keterkaitan antara income dan kasus stunting yang terdeteksi. Hasil dari Riskesdas menunjukkan bahwa quintile 1 dan quintile 2 (kategori sangat miskin dan miskin) relative memiliki proporsi kasus stunting yang relative tinggi, dan semakin memiliki tingkat income yang lebih baik maka kecenderungan stunting akan semakin menurun (data tahun 2013 sampai 2017).

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), Juli 2019, prevalensi stunting balita di Jatim adalah 36,81%. Tiga daerah dengan prevalensinya tertinggi adalah Kota Malang (51,7%), Kabupaten Probolinggo (50,2%), dan Kabupaten Pasuruan (47,6%). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81%. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yakni sebesar 30,80%.

Program pemerintah terkait stunting di Kabupaten Lamongan diantaranya adalah melalui GENTING (gerakan orang tua asuh untuk stunting). Sebuah program yang sudah berjalan sejak tahun 2023 didukung oleh Nutrition International. Beberapa locus di Kabupaten Lamongan menjadi sasaran program ini. Program ini dilaksanakan sebagai integrasi suplementasi zat gizi mikro untuk menurunkan anemia gizi besi pada ibu hamil serta sakit dan kematian balita. Melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil untuk mengurangi anemia dan meningkatkan hasil kehamilan, pemberian vitamin A pada anak balita untuk melindungi balita dari infeksi oportunistik dan meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh balita serta pemberian Zinc dan oralit untuk mengobati diare pada anak balita.

BAB III
KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

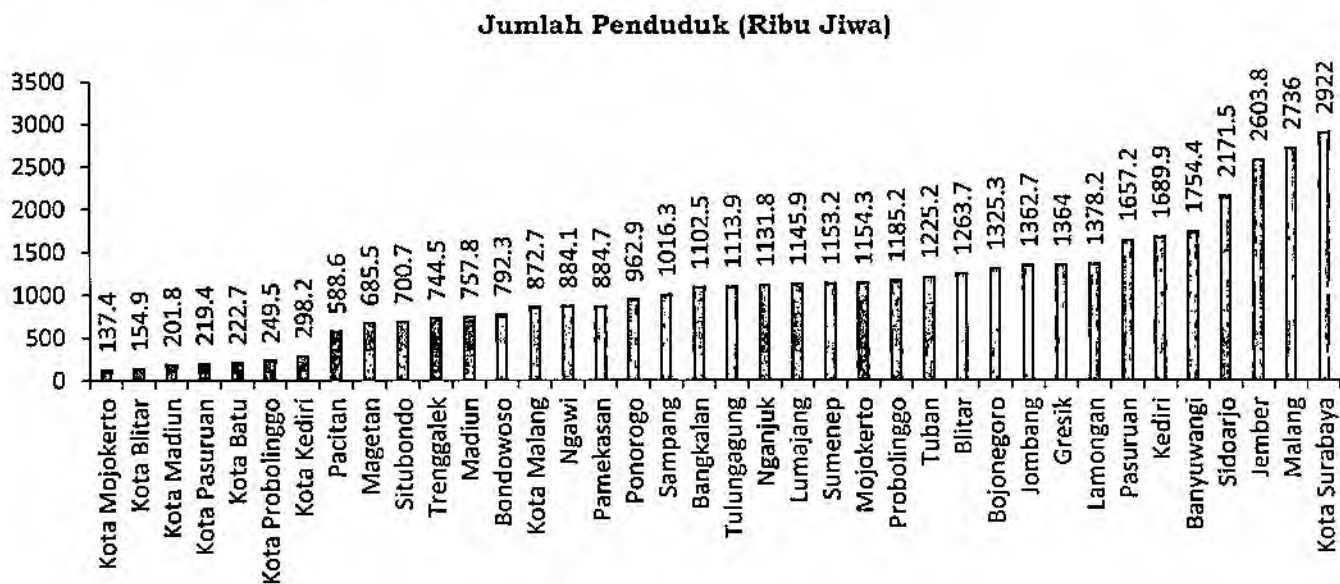
3.1 Faktor Determinan Pangan dan Gizi

3.1.1 Situasi Pembangunan Pangan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa upaya menjaga kesinambungan pembangunan pangan, syarat pertamanya adalah ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan baik sampai dengan tingkat individu.

Kebutuhan akan pangan berkaitan erat dengan seberapa besar populasi dan seberapa cepat pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar populasi dan semakin cepat pertumbuhan maka kebutuhan akan pangan menjadi faktor yang semakin signifikan dalam pembangunan.

Berikut adalah posisi Jumlah populasi penduduk di Kabupaten Lamongan terhadap Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.

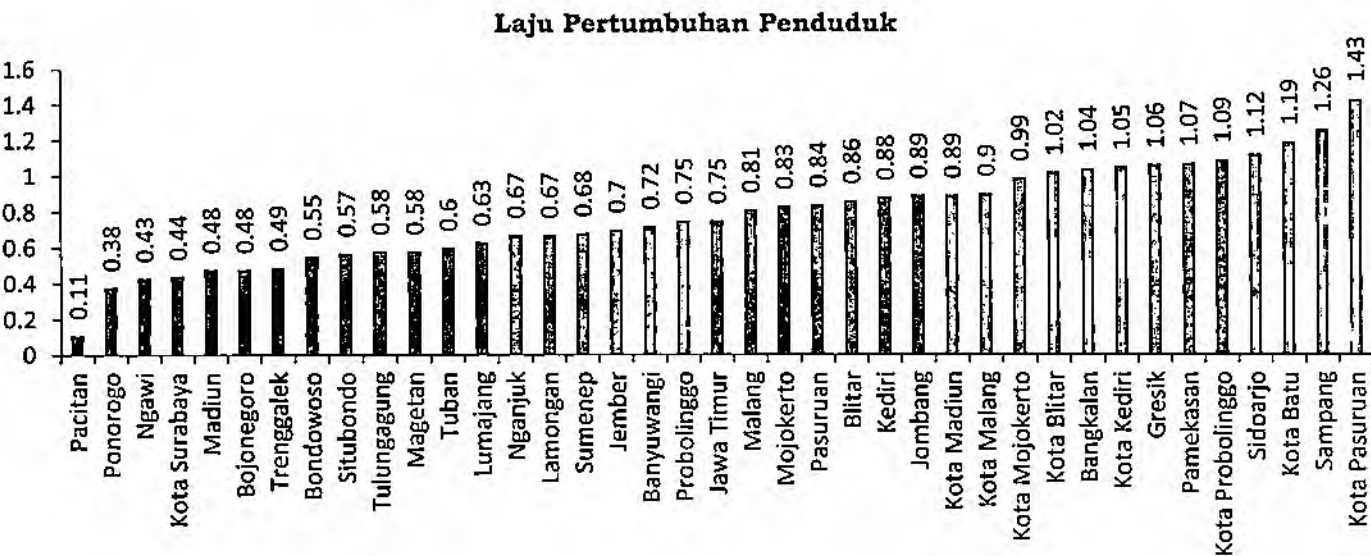


Gambar 2. Jumlah populasi (ribu jiwa) per kabupaten se- Jawa Timur Sumber: BPS Provinsi Tahun 2024

Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 1,812.8 Km² menjadikan sekitar 3,78% (tiga koma tujuh puluh delapan persen) dari luas Provinsi Jawa Timur dan memiliki garis pantai sepanjang 47 km dengan wilayah perairan laut seluas 902,4 Km². Wilayah ini terbagi menjadi 27 Kecamatan dan mencakup area daratan serta perairan yang kaya akan potensi perikanan dan wisata bahar memiliki penduduk di tahun 2024 tercatat 1,378.147 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan yakni merupakan Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduknya melambat yaitu 0.67 persen. Ini juga berarti, bahwa Kabupaten Lamongan memiliki tekanan penduduk yang relative paling rendah dibanding Daerah lainnya. Tekanan penduduk dapat berimplikasi penting pada pentingnya penyediaan pangan yang cukup, ini berarti kapasitas produksi pangan harus meningkat, dan di sisi lain berarti perlunya penyediaan resettlement yang semakin meningkat. Tekanan populasi penduduk seringkali berdampak pada peningkatan alih

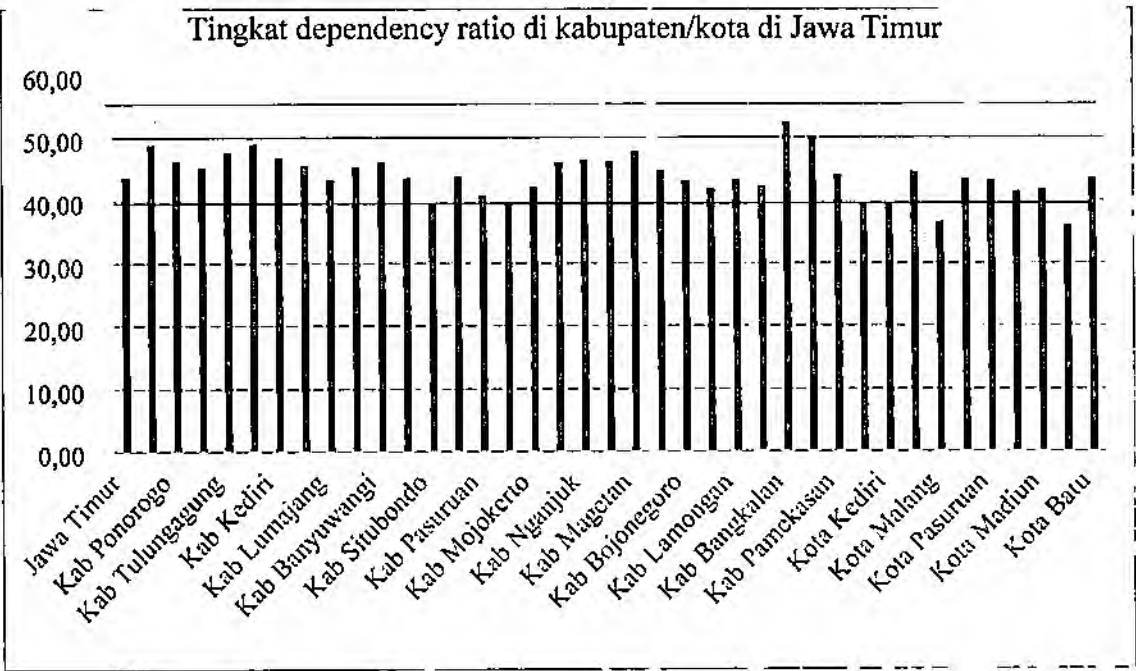
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan lainnya. Ini artinya, terjadi pengurangan potensi produksi pangan di sisi lainnya.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab/ Kota se- Jawa Timur
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat dari komposisi penduduk, karakteristik demografi dapat dilihat dari dependency ratio. Rasio antara penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif, baik itu yang kurang dari 15 tahun atau yang lebih dari 65 tahun memberikan indikasi tingkat ketergantungan. Hal ini kemudian dirumuskan dalam dependency ratio atau rasio ketergantungan.

Kabupaten Lamongan dari struktur demografinya menunjukkan tingkat angka ketergantungan sekitar 50 persen. Ini berarti setiap seorang bukan usia produktif ditanggung oleh rata-ratanya sekitar 2 orang lebih usia produktif. Berikut adalah grafik rincian dependency ratio-nya.



Gambar 4. Dependensi rasio per Kabupaten

Sumber: BPS Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki dependency rasio yang relatif tinggi dibanding dengan Kabupaten lainnya di provinsi Jawa Timur. Masing-masing Kecamatan memiliki dependensi rasio antara 49% (empat puluh sembilan persen) sampai 50% (lima puluh persen).

Tingginya dependensi rasio memberikan signal dalam aspek demografi akan tingginya beban yang harus ditanggung usia produktif. Dengan dependensi rasio yang tinggi maka tanggungan usia produktif semakin tinggi sehingga surplus yang dibangkitkannya harus di share dengan orang yang tidak produktif dalam jumlah yang lebih banyak. Dependensi rasio meningkatkan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kecuali jika produktifitas usia produktif meningkat.

Kondisi pangan dunia saat ini kompleks, terjadi krisis kerawanan pangan akut yang mempengaruhi ratusan juta jiwa orang akibat konflik, perubahan iklim dan guncangan ekonomi. Namun disisi lain terjadi lonjakan pasokan (terutama beras) di beberapa wilayah yang menekan harga global sementara malnutrisi (termasuk gizi kurang dan gizi buruk) tetap menjadi masalah besar hingga saat ini terutama bagi anak-anak dan perempuan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi pangan global Perubahan Iklim: Cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir sangat memengaruhi produksi pangan, bahkan di negara maju, sektor politik yakni konflik mengganggu produksi pangan, merusak infrastruktur, dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan, sektor ekonomi Guncangan Ekonomi: Inflasi, kenaikan harga energi dan pupuk, serta depresiasi mata uang memperburuk ketersediaan pangan, terutama bagi negara-negara miskin dan negara pengimpor, Ketergantungan Impor: Banyak negara, termasuk Indonesia, bergantung pada impor untuk komoditas pangan seperti gandum, yang membuat mereka rentan terhadap gangguan pasokan global dan sektor kesehatan yakni Malnutrisi: Selain kelaparan, sekitar 2,33 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan lebih dari 3,1 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat.

Selain terkait isu GFSI, pencapaian SDGs juga menjadi input penting untuk diperhatikan dalam rangka pembangunan pangan nasional dan juga pembangunan pangan Jawa Timur. Hasil analisis pencapaian SDGs Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 102 dari 162 negara. Beberapa kelemahan penting dari peringkat Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain adalah terkait dengan kelemahan dalam infrastruktur, inovasi dan industri, kesenjangan yang relatif tinggi, pengelolaan di darat, pengelolaan di air, dan juga permasalahan di partnership dalam pencapaian tujuan ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi dan seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Tujuan penyelenggaraan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah :

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumberdaya Pangan nasional.

Aspek ketersediaan dan akses pangan merupakan dimensi penting lainnya dari pembangunan pangan dan gizi. Aspek ketersediaan diperoleh dari potensi produksi pangan domestik dan dapat pula melalui impor pangan dari daerah lainnya. Sedangkan kemampuan dari akses pangan merupakan representasi dari ketersediaan yang cukup dan kemampuan daya beli masyarakat. Mantapnya ketersediaan pangan, daya beli masyarakat yang baik didukung pengetahuan tentang gizi dan penggunaan pangan yang baik akan menjadi komposisi ideal bagi pembangunan pangan dan perbaikan kesehatan serta kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan pangan di Kabupaten Lamongan terus dimantapkan melalui program-program pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam RPJMD 2025-2029. Pembangunan pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan diwujudkan melalui pembangunan kawasan-kawasan pertanian secara umum dan luas. Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam RPJMD adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian (tanaman pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan) yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

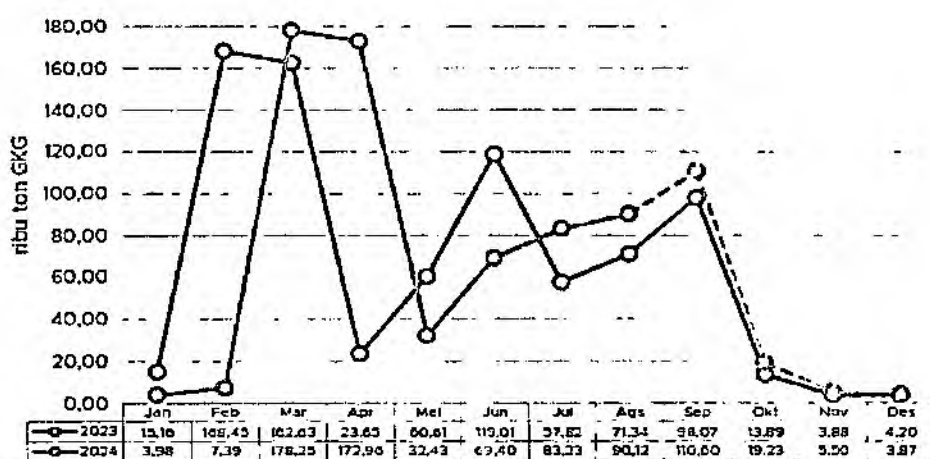
Kawasan pertanian ini akan mendorong semakin tumbuhnya korporasi petani, yaitu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Dengan demikian Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani merupakan kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Dengan demikian, wilayah penting pengembangan dalam kawasan pertanian adalah wilayah fungsional yang sangat mungkin terjadi lintas wilayah administratif.

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah:

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk

- keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
- b. memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan;
 - c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran. Kondisi existing pertanian terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan dapat disajikan sebagai berikut.

Ditinjau dari sisi produksi Kabupaten Lamongan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran sebagai penyuplai logistik/lumbung pangan nasional. Surplus produksi pertanian yang dihasilkan Kabupaten Lamongan menjadi ketersediaan pangan Provinsi.



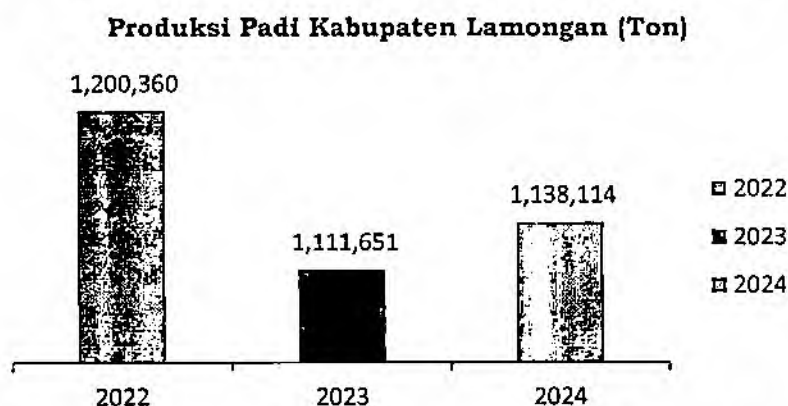
Keterangan: * Produksi Padi Oktober-Desember 2024 adalah angka potensi
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Gambar 5. Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Lamongan (Ribu Ton-GKG), 2023-2024*

* = angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Sebagaimana sifat alami sektor pertanian, tidak semua lokasi adalah sentra produksi pertanian. Sentra produksi padi misalnya banyak dihasilkan oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Lamongan. Ketiganya adalah produsen terbesar Pangan di Jawa Timur. Selengkapnya dapat dilihat dari garfik berikut ini.

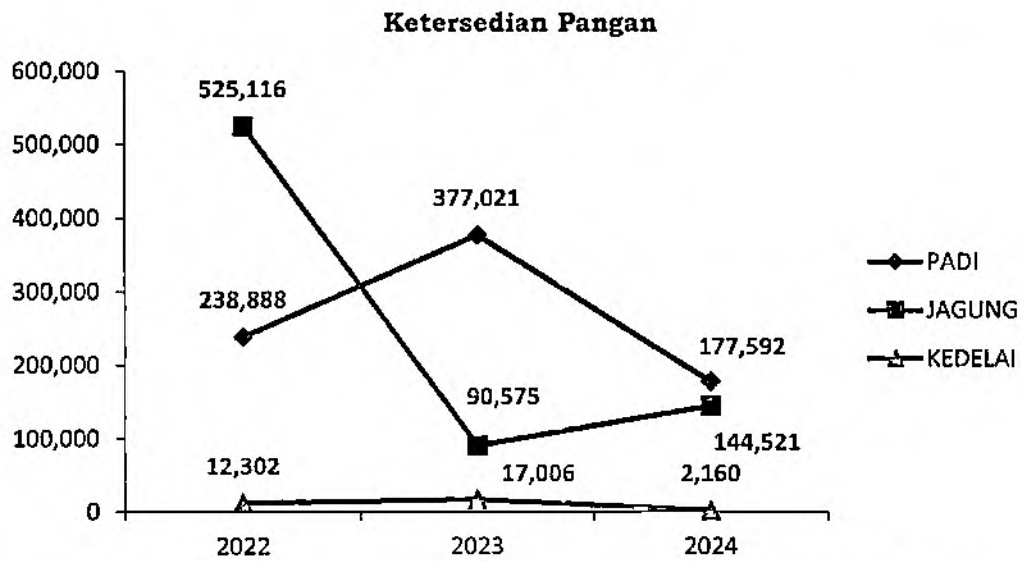


Gambar 6. Produksi Padi Kabupaten Lamongan (Ton), 2022-2024

Selain distribusi yang tidak merata, aspek fluktuasi produksi antar waktu juga penting menjadi perhatian yang serius. Siklus musiman musim tanam komoditas

pertanian menyebabkan produksi pertanian juga bervariasi tidak terkecuali komoditas padi sebagai bahan makanan utama. Pada umumnya, produksi padi terbanyak pada bulan April - Agustus, kemudian menurun terus seiring dengan perubahan cuaca dan ketersediaan air.

Selain komoditas beras/padi, Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi produksi jagung , kedelai dan shorgum yang sangat besar. Untuk komoditas kedelai, produksi Kabupaten Lamongan relatif tinggi dibandingkan Kabupaten lain.

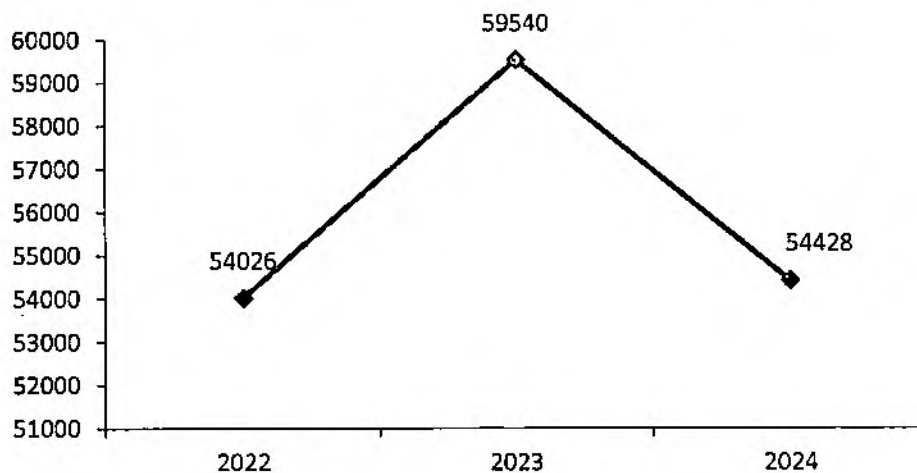


Gambar 7. Ketersediaan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024

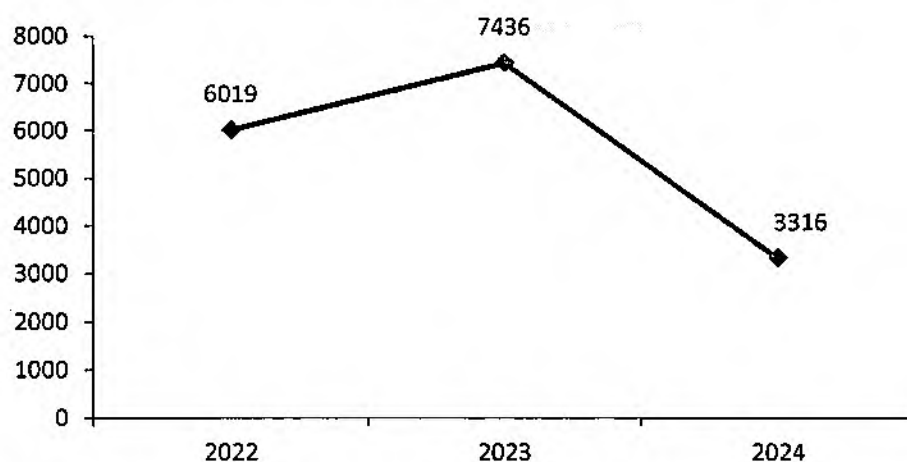
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lamongan

Sumberdaya lahan digunakan untuk komoditas jagung di Kabupaten Lamongan cenderung menurun di beberapa tahun terakhir. Namun demikian, untuk areal kedelai menunjukkan trend yang fluktuatif tergantung cuaca. Dalam kontek produksi pertanian, petani rasional dengan melihat potensi keuntungan yang diharapkan. Jika potensi keuntungan diharapkan pada komoditas tertentu menurun pada umumnya petani akan beralih ke komoditas lain.

Luas Tanam (Ha) Komoditas Jagung di Kabupaten Lamongan



Luas Tanam (Ha) Komoditas Kedelai di Kabupaten Lamongan



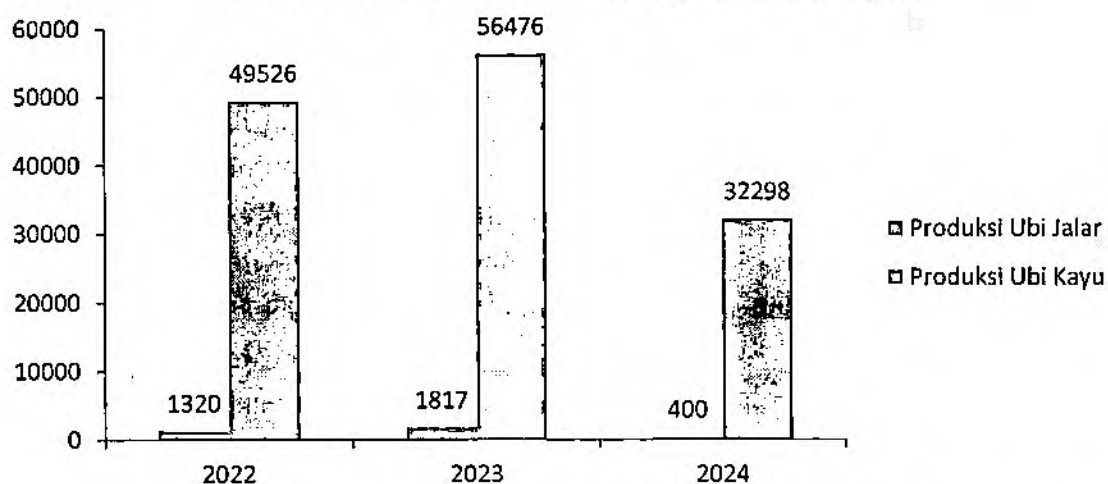
Gambar 8. Luas Tanam (Ha) Komoditas Jagung dan Kedelai di Kabupaten Lamongan, 2022-2024

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Ubi kayu di Kabupaten Lamongan diproduksi dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 2024 menunjukkan terjadi penurunan produksi ubi kayu hal ini dipengaruhi oleh serangan OPT. Tahun 2022 produksi ubi kayu sebesar 49526 ton kemudian menurun di tahun 2023 meningkat menjadi sekitar 56476 ton dan di tahun 2024 produksi ubi kayu mengalami penurunan yang signifikan yakni 32298 ton. Begitu juga dengan produksi ubi jalar sangat fluktuatif.

Berikut adalah Gambar produksi baik ubi jalar dan ubi kayu diproduksi di Kabupaten Lamongan.

Produksi Ubi Jalar dan Ubi Kayu di Kabupaten Lamongan (Ton)

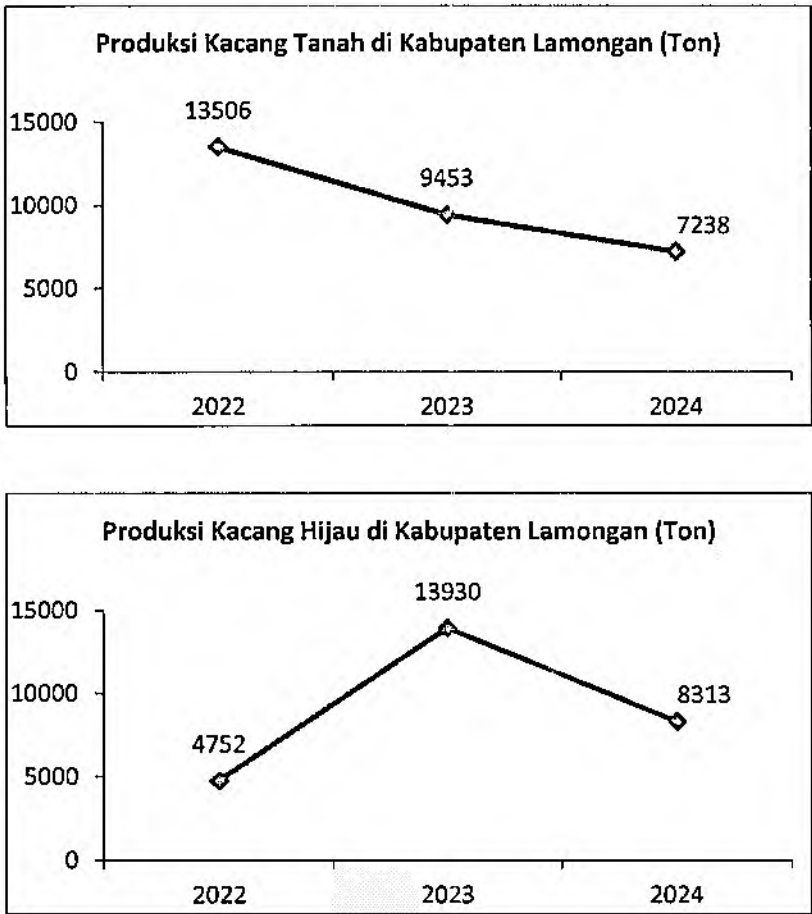


Gambar 9. Produksi Komoditas Ubi Jalar dan Ubi Kayu di Kabupaten Lamongan (Ton), 2022-2024

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan

Potensi produksi kacang tanah mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 cenderung mengalami penurunan produksi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh kurang minatnya tanam oleh petani, perubahan iklim dan lain-lain. Gambar perkembangan produksi dari tahun ke tahun komoditas pertanian pangan di Kabupaten Lamongan

menunjukkan kuatnya potensi ketersediaan pangan. Namun demikian, aspek akses dan pemanfaatan pangan adalah aspek lain yang juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan dari waktu ke waktu. Sedangkan produksi komoditas kacang hijau flutuatif, hal ini dipengaruhi jika harga kedelai tinggi maka minat petani untuk menanam kedelai sangat tinggi begitu dengan sebaliknya. Harga Komoditas kacang hijau di kabupaten Lamongan relatif stabil.



Gambar 10. Produksi Kacang Tanah dan Kacang Hijau di Kabupaten Lamongan (Ton), 2022-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lamongan

Selain kaya akan produksi tanaman pangan, Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi besar di tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Berikut adalah gambaran potensi produksi beberapa subsektor tersebut di Kabupaten Lamongan

Tabel 5. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (kw) Kabupaten Lamongan, 2022-2024

No	Jenis Tanaman	2022	2023	2024
1	Bawang Daun/Scallion(kw/qui)			65
2	Bawang Merah/Shallots(kw/qui)	7948	4952.59	2983.89
3	Bawang Putih/Garlic(kw/qui)			
4	Bayam/Spinach(kw/qui)	95	50	117.3
5	Buncis/string bean (kw/qui)			
6	Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper (kw/qui)	266216	262308.1	330992.5
7	Kacang Panjang/Long Beans(kw/qui)	961	350.21	67

No	Jenis Tanaman	2022	2023	2024
8	Kangkung/Water Spinach(kw/qui)	1399	1043.6	574.7
9	Kembang Kol/Cauliflower(kw/qui)			
10	Kentang/Potato(kw/qui)			
11	Ketimun/Cucumber(kw/qui)	1012	1072.42	205
12	Kubis/Cabbage(kw/qui)			
13	Labu Siam/Chayote(kw/qui)			4
14	Melon/Melon(kw/qui)	7028	3272.73	2582.7
15	Paprika/Bell Pepper(kw/qui)			
16	Petsai/Sawi/Chinese Cabbage/mustard green(kw/qui)	744	207.8	253.56
17	Semangka/Watermelon(kw/qui)	7949	9254	11642
18	Stroberi/Strawberry(kw/qui)			
19	Terung/Eggplant(kw/qui)	2348	2357	1564.5
20	Tomat/Tomato(kw/qui)	2725	2494.74	1556.5
21	Wortel/Carrot(kw/qui)			
22	Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/Big chili (kw/qui)	2314	1765.5	1485.3
23	Cabai Keriting/Chili/Curly chili (kw/qui)			
24	Jamur Tiram/King Oyster Mushroom(kg)	208		8.6
25	Jamur Merang/Straw Mushroom(kg)			
26	Jamur Lainnya/Mushroom(kg)			

Sumber: BPS Lamongan

Dari komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim diketahui bahwa Kabupaten Lamongan memiliki produksi yang besar di komoditas cabe rawit, cabai besar, tomat dan bawang merah. Keempat komoditas tersebut masuk dalam sayur-sayuran. Sedangkan buah-buahan semusim di Kabupaten Lamongan didominasi oleh komoditas semangka, melon dan mentimun.

Sedangkan untuk komoditas buah-buahan tahunan di Kabupaten Lamongan didominasi oleh komoditas pisang, mangga dan pepaya. Produksi pisang tahun 2024 sebesar 239663 kwintal per tahun, sedangkan mangga sebesar 261058.7 kwintal dan sukun masing-masing diproduksi sekitar 7552.01 kwintal per tahun. Berikut adalah data produksi masing-masing komoditas buah-buahan diproduksi di Kabupaten Lamongan.

Tabel 6. Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan di Kabupaten Lamongan, 2022 – 2024

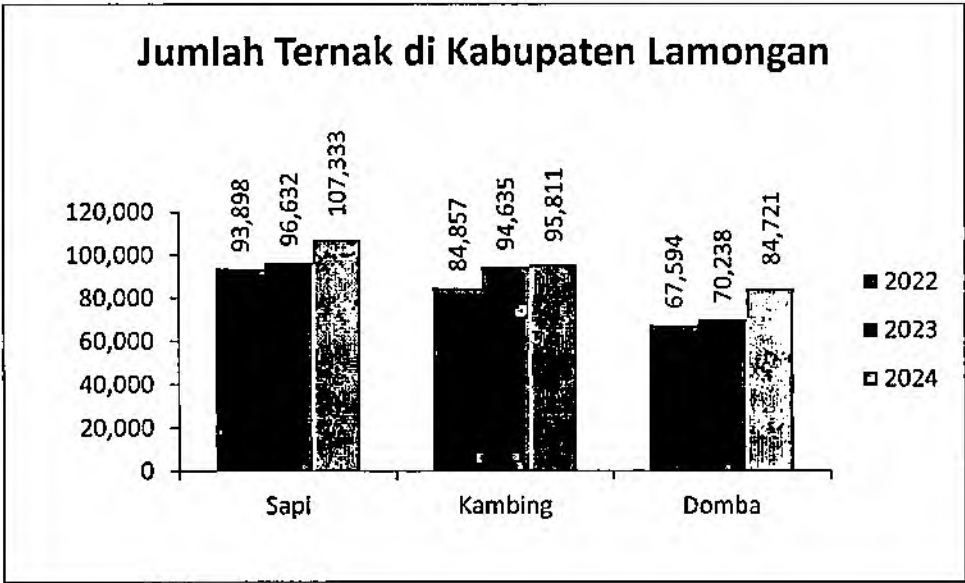
No	Jenis Tanaman	2022	2023	2024
1	Alpukat/Avocado(kw/qui)	60	96	127.15
2	Anggur/Grape(kw/qui)			
3	Apel/Apple(kw/qui)			
4	Belimbing/Star Fruit(kw/qui)	3839	3652	2862.52
5	Duku/Langsar/Kokosan/Duku(kw/qui)			
6	Durian/Durian(kw/qui)	420	185	1330
7	Jambu Air/Water Apple(kw/qui)	7243	6681	5843.32
8	Jambu Biji/Guava(kw/qui)	16307	13603	24013.24
9	Jengkol/Jengkol(kw/qui)			
10	Jeruk Besar/Pomelo(kw/qui)			
11	Jeruk Siam/ Keprok/ Orange/ Tangerine	6922	2063	3163.5

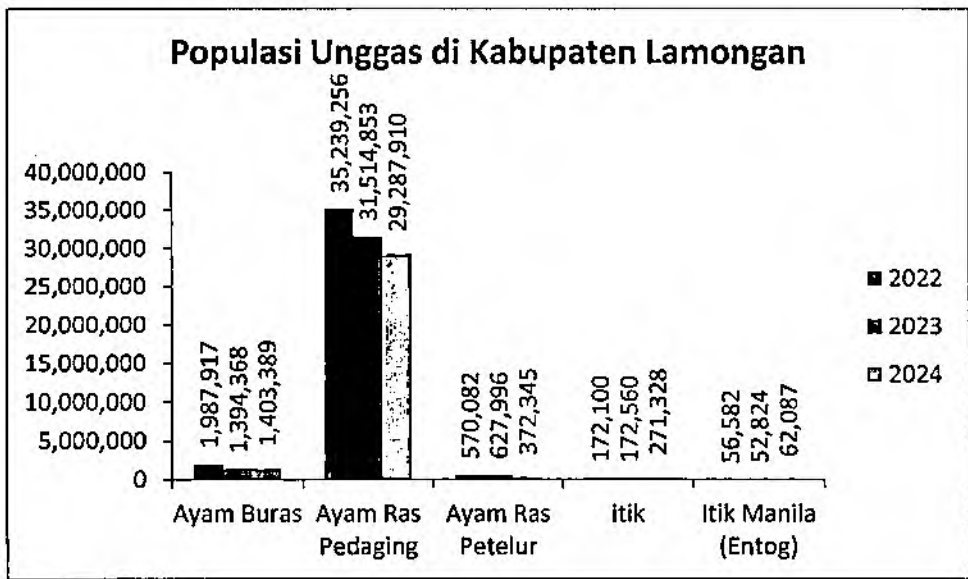
No	Jenis Tanaman	2022	2023	2024
	(kw/qui)			
12	Mangga/Mango(kw/qui)	257376	349745	261058.7
13	Manggis/Mangosteen(kw/qui)			
14	Melinjo/Gnetum/Melinjo(kw/qui)	37	90	85.2
15	Nangka/Cempedak/Jackfruit(kw/qui)	22972	26641	21807.72
16	Nenas/Pineapple(kw/qui)			
17	Pepaya/Papaya(kw/qui)	14316	9163	8590.07
18	Petai/Twisted Cluster Bean(kw/qui)	105	38	29.6
19	Pisang/Banana(kw/qui)	470097	186458	239663
20	Rambutan/Rambutan(kw/qui)	1950	8300	2075
21	Salak/Snakefruit(kw/qui)			
22	Sawo/Sapodilla/Sawo(kw/qui)	4093	7052	4809.61
23	Sirsak/Soursop(kw/qui)	16823	5370	4285.86
24	Sukun/Breadfruit(kw/qui)	16594	6967	7552.01
25	Buah Naga/Hylocereus polyrhizus(kw/qui)	20	40	79.5
26	Jeruk Lemon/Lemon(kw/qui)			
27	Lengkeng/ Dimocarpus longan(kw/qui)	124	274	356.55

Gambar 14. Produksi sayur dan buah semusim di Kabupaten Lamongan
Sumber: BPS Lamongan

Potensi peternakan di Kabupaten Lamongan dapat digambarkan dalam Gambar berikut ini. Untuk kelompok ruminansia, populasi sapi adalah yang terbesar kemudian disusul populasi ternak kambing dan domba. Untuk populasi unggas, yang terbesar adalah ayam ras pedaging dan kemudian disusun ayam buras.

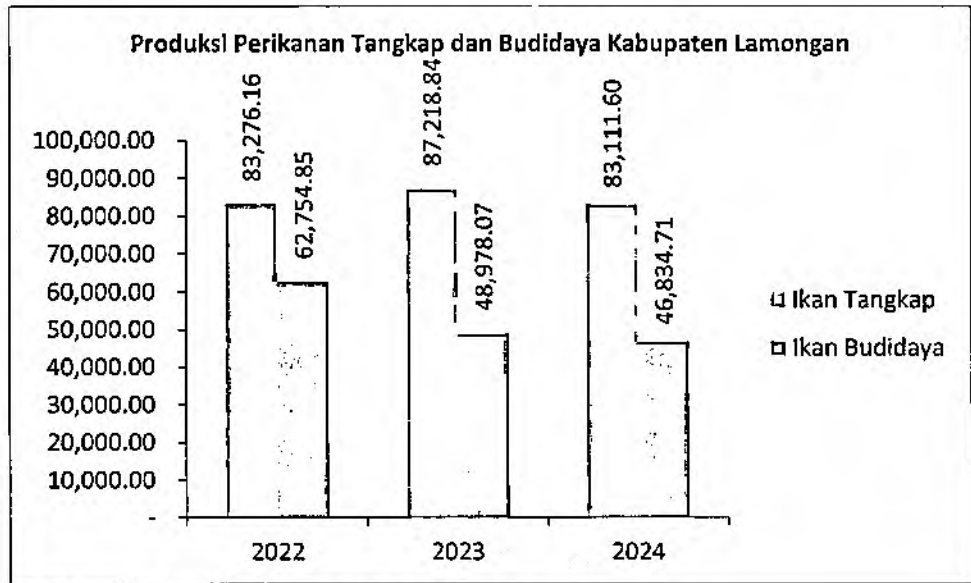
Sebagaimana dimaksud dalam gambar dibaeah ini :





Gambar 11. Populasi ternak dan Unggas di Kabupaten Lamongan
Sumber : Data Ekspose Kabupaten Lamongan

Sementara itu, keragaan perikanan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari Gambar berikut ini. Perikanan budidaya tiga tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya alokasi pupuk bbersubsidi untuk petani tambak. Sedangkan untuk perikanan tangkap trend kenaikannya fluktuatif, hal ini dikarenakan tergantung dengan cuaca. Jika cuaca sangat mendukung maka nelayan akan melaut begitu dengan sebaliknya.



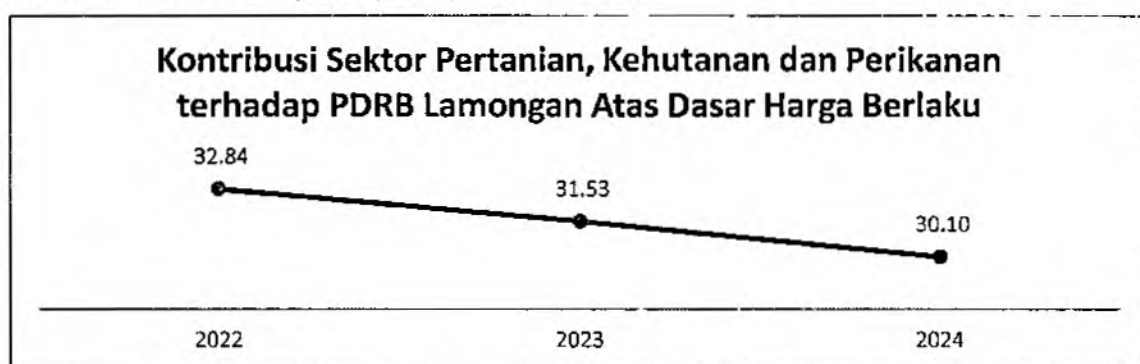
Gambar 12. Produksi perikanan di Kabupaten Lamongan
Sumber: Data Ekspose Kabupaten Lamongan

Potensi produksi perikanan di Kabupaten Lamongan sangat tinggi, baik perikanan tangkap maupun budidaya karena sawah yang ada di Kabupaten Lamongan merupakan sawah tambak yakni pada saat musim hujan petani akan membudidaya ikan di sawah tambak tersebut dan jika masuk tanam kedua atau ketiga petani akan menanam padi di area sawah yang sama. Untuk perikanan budidaya, sebaran produksi ikan didominasi oleh

Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi, Kalitengah, Karanggeneng dan Brondong Sedangkan untuk perikanan tangkap sebaran produksinya berada di Kecamatan Paciran dan Brondong.

Nilai penting sektor pertanian selain sebagai kontribusi pada ketahanan pangan juga merupakan penopang perekonomian di Kabupaten Lamongan. Sektor pertanian berkontribusi sangat besar pada PDRB Kabupaten Lamongan yang menduduki 3 (tiga) besar struktur kontribusi. Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian sebesar menyumbang 32,84 persen pada struktur PDRB Kabupaten Lamongan, kemudian pada tahun 2023 mengalami kontraksi sehingga kontribusinya sebesar 31,53 begitu juga dengan tahun 2024 berkontraksi sehingga kontribusinya sebesar 30,10 dari PDRB Kabupaten Lamongan.

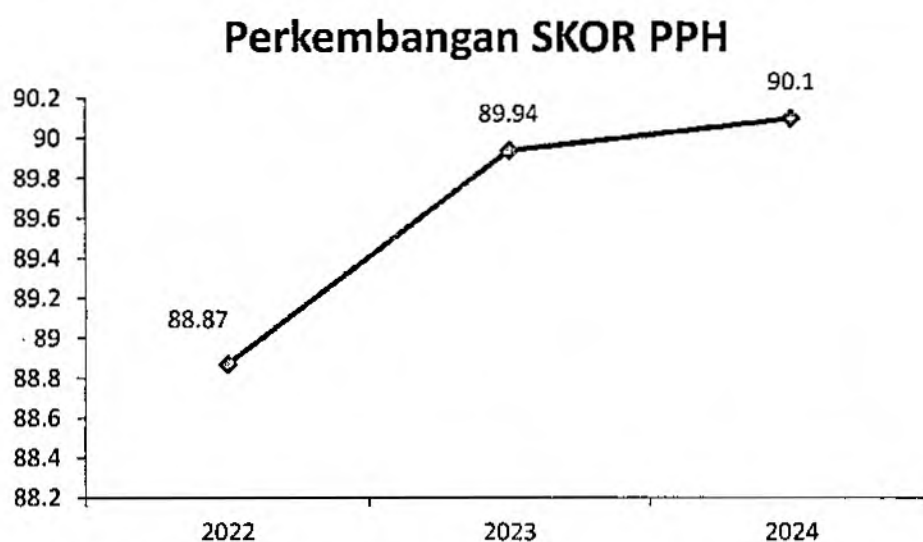
Grafik kontribusi disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13. Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB Kab Lamongan

Sumber: BPS Lamongan

Dengan potensi produksi pangan baik dari hewani maupun nabati diharapkan akan memberikan dampak positif pada konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lamongan yang lebih sehat dan bergizi, termasuk pula diversifikasi pangannya. Ditinjau dari diversifikasi pangannya, capaian skor PPH Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Perkembangan skor PPH Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor PPH setiap tahunnya mengalami peningkatan capaian skor, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni keberhasilan

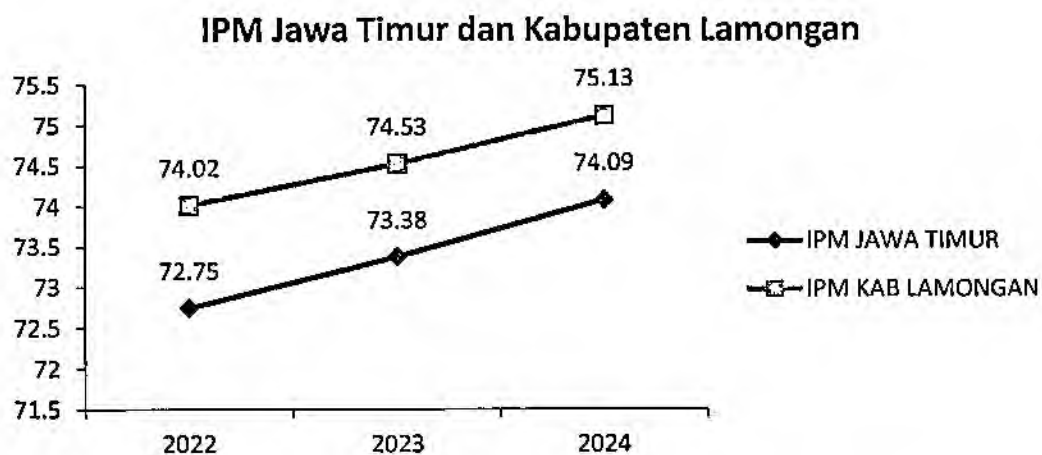
program pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menurunkan atau menekan angka stunting melalui program 1, 10,100, adanya program pendampingan bagi ibu hamil dan balita serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan menerapkan pola diversifikasi makanan melimpahnya stok pangan yang tersedia.

3.1.2 Situasi Gizi di Kabupaten Lamongan

Outcome dari pembangunan pangan dan gizi adalah terbentuknya SDM yang sehat dan produktif dengan turunnya angka stunting, obesitas dan wasting. Ini terkait dengan pembangunan kualitas SDM yang dikonstruksikan dari pembangunan pangan dan gizi. Pengukuran tingkat pembangunan kualitas sumberdaya manusia dengan menggunakan IPM tidak hanya memperhitungkan tingkat standar hidup masyarakat saja, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan dan juga hidup sehat dan angka harapan hidup masyarakat. Secara lebih rinci, tiga dimensi dasar yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia dengan menggunakan metode ini adalah:

- Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;
- Pengetahuan yang diukur dengan Angka Melek Huruf, yaitu Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, dan rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal; dan
- Standar kehidupan yang layak diukur dengan produk domestik bruto per kapita dengan paritas daya beli.

Selama lima tahun terakhir, pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Lamongan yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2022 sebesar 74,02, tahun 2023 IPM Kabupaten Lamongan sebesar 74,53 dan pada tahun 2024 yaitu 75,13. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup baik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi, IPM Kabupaten Lamongan lebih tinggi daripada capaian Provinsi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 15. Nilai IPM Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan

Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM di Kabupaten Lamongan menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, namun ada permasalahan di aspek lain yang perlu diperhatikan dan diupayakan perbaikannya, yaitu terkait dengan kesehatan ibu dan balita.

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain) per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lamongan tahun dari 2022 sampai dengan tahun 2024 yakni zero kasus.

Angka kematian ibu melahirkan paling banyak disebabkan pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Peningkatan kesadaran bagi ibu yang memiliki resiko tinggi agar lebih aware, dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang diharapkan bisa menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

Sedangkan, Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

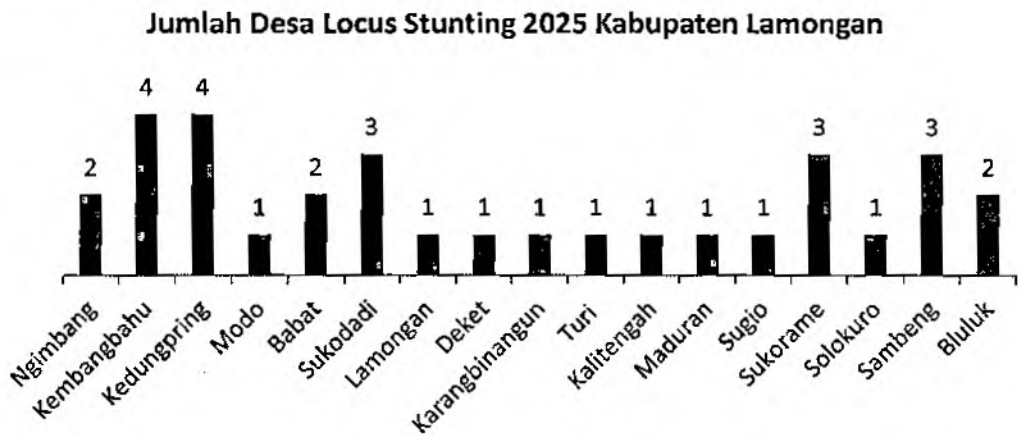
Tingginya angka kematian bayi dipicu karena asfiksia dan berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram. Berdasarkan tabel diatas, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lamongan cenderung menurun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu periode 2022 - 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan.

Kondisi bayi yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Stunting cenderung menurun periode 3 (tiga) tahun ini, yaitu tahun 2022-2024. Semua pihak harus berkerja keras dalam menurunkan stunting. Masyarakat, pemerintah, institusi kesehatan serta seluruh stakeholder yang terlibat harus bersinergi menurunkan stunting. Berikut AKI dan AKB :



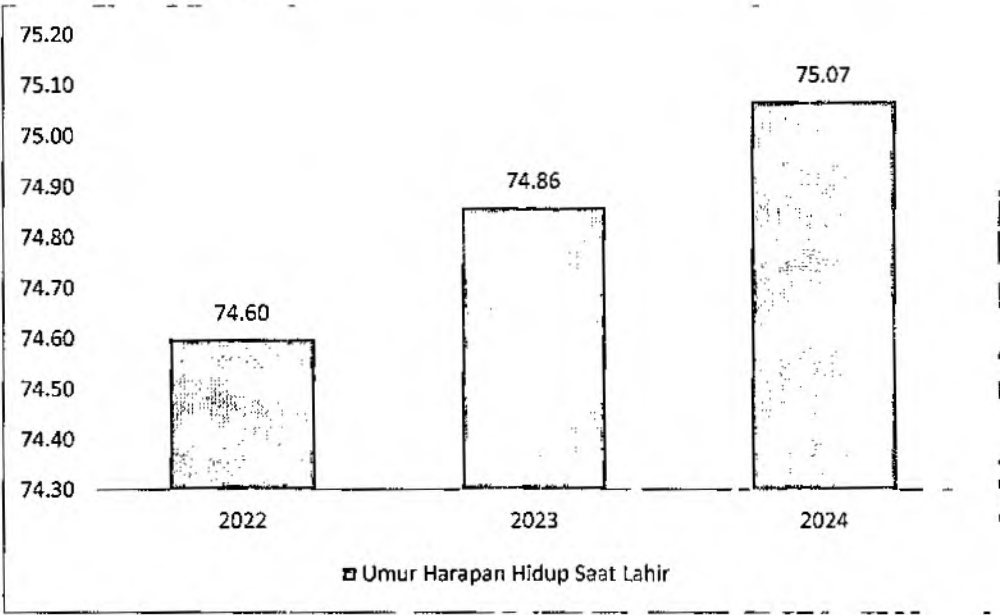
Gambar 16. AKI dan AKB Kabupaten Lamongan 2022-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan



Gambar 23. Locus Stunting Kabupaten Lamongan Tahun 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Dilihat dari gambar diatas, locus stunting terdapat di Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Kedungpring disusul dengan Kecamatan Sukodadi, Sukorame dan Kecamatan Sambeng. Locus sebaran angka stunting ini akan dianalisis terperinci yang memecah data angka stunting pada beberapa perangkat daerah teknis seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

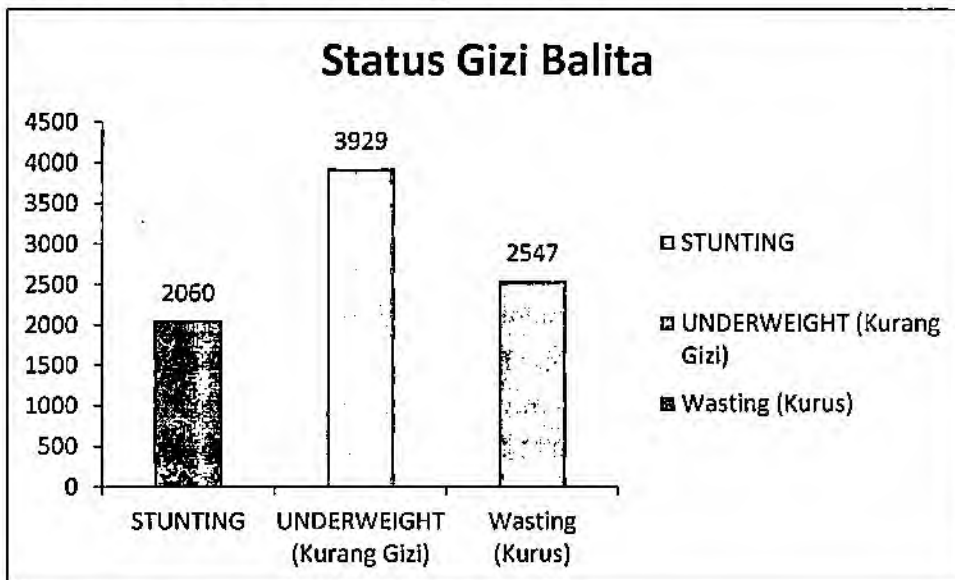
Aspek penting yang merupakan impact dari pembangunan pangan dan gizi adalah tingkat harapan usia penduduk yang diukur dari AHH (angka harapan Hidup). Angka Harapan Hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku.



Gambar 26. Perkembangan AHH di Kabupaten Lamongan
Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Jawa Timur 2025-2029

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lamongan cenderung mengalami peningkatan selama periode 3 (tiga) tahun ini, yaitu tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya khususnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Menggambarkan juga efektivitas pelaksanaan program pembangunan pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan.

Dalam komparasi tingkat nasional, kinerja pembangunan pangan dan gizi dapat digambarkan sebagai berikut. Dari Gambar di bawah ini diketahui bahwa dalam kaitannya dengan balita gizi buruk dan gizi kurang terjadi perbaikan gizi balita tetapi perubahan masih relative kecil. Hal yang sama terkait dengan kondisi data balita pendek dan sangat pendek. Penurunan persentase balita pendek dan sangat pendek terlihat relative kecil. Secara detail dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Status gizi balita di Kabupaten Lamongan
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3.1.3 Faktor Penyebab Masalah Pangan dan Gizi

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada RPJMN 2025-2029, juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya The World Health Assembly pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs).

Komitmen dalam The World Health Assembly pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu:

- penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek;
- penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur;
- penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR;
- peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen;
- menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen.

Kemudian pada tahun 2030 diagendakan untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru untuk mendorong perubahan- perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong

pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk melaksanakan agenda tersebut dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan SDGs, diantaranya:

- a. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan
- b. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman, sumberdaya produktif, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, peluang nilai tambah dan pekerjaan non pertanian
- c. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
- d. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.

Terdapat 2 (dua) faktor langsung penyebab permasalahan gizi pada anak balita, yaitu makanan dan penyakit infeksi. Kedua faktor ini saling terkait satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat pada gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk, artinya pencegahan terhadap infeksi akan meningkatkan status gizi balita.

Faktor penyebab langsung pertama adalah makanan yang dikonsumsi, harus memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang. Makanan lengkap bergizi seimbang bagi bayi sampai usia 6 (enam) bulan adalah air susu ibu (ASI), yang dilanjutkan dengan tambahan makanan pendamping ASI (MP-ASI) bagi bayi usia 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun.

Data menunjukkan masih rendahnya persentase ibu yang memberikan ASI, dan MP-ASI yang belum memenuhi gizi seimbang oleh karena berbagai sebab. Faktor penyebab langsung yang kedua adalah infeksi yang berkaitan dengan tingginya prevalensi dan kejadian penyakit infeksi terutama diare, ISPA, TBC, malaria, demam berdarah dan HIV/AIDS. Infeksi ini dapat mengganggu penyerapan asupan gizi sehingga mendorong

terjadinya gizi kurang dan gizi buruk. Sebaliknya, gizi kurang melemahkan daya tahan anak sehingga mudah sakit. Kedua faktor penyebab langsung gizi kurang itu memerlukan perhatian dalam kebijakan ketahanan pangan dan program perbaikan gizi serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Kedua faktor penyebab langsung tersebut dapat ditimbulkan oleh tiga penyebab tidak langsung, yaitu: ketersediaan dan pola konsumsi pangan dalam rumah tangga, pola pengasuhan anak, dan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiganya dapat berpengaruh pada kualitas konsumsi makanan anak dan frekuensi penyakit infeksi.

Apabila kondisi pola konsumsi, pola pengasuhan anak, dan layanan kesehatan kurang baik menyebabkan rawan gizi kurang. Rendahnya kualitas konsumsi pangan dipengaruhi oleh kurangnya akses rumah tangga dan masyarakat terhadap pangan, baik akses pangan karena masalah ketersediaan maupun tingkat pendapatan yang mempengaruhi daya beli rumah tangga terhadap pangan. Pola asuh, pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan dipengaruhi oleh pendidikan, pelayanan kesehatan, informasi, pelayanan keluarga berencana, serta kelembagaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

Ketidakstabilan ekonomi, politik dan sosial, dapat berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yang antara lain tercermin pada maraknya masalah gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini bertumpu pada pembangunan ekonomi, politik dan social yang harus dapat menurunkan tingkat kemiskinan setiap rumah tangga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi serta memberikan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Beberapa program intervensi dicanangkan melalui rancangan RAN-PG adalah penanganan balita gizi buruk, pemberian suplemen mikronutrient dan fortifikasi. Pengembangan ketahanan pangan, jaminan sosial, ketersediaan air bersih, peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi juga merupakan serangkaian program yang diharapkan berdampak positif pada status gizi masyarakat.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan cakupan intervensi gizi di Provinsi Jawa Timur memerlukan dukungan dari berbagai sektor baik pemerintah maupun non pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

3.2 Intervensi Gizi Terintegrasi

Dalam rangka mengatasi permasalahan gizi diketahui bahwa intervensi gizi spesifik yang sebagian besar dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan berpengaruh secara langsung merupakan yang paling efektif (Bhutta, 2013). Keberlanjutan intervensi ini bergantung pada pelaksanaan intervensi gizi sensitif, yang merupakan faktor mendasar

yang mempengaruhi status gizi, intervensi sensitif dilaksanakan oleh sektor lain seperti pendidikan, pertanian, pekerjaan umum/infrastruktur, dan kesejahteraan sosial (WHO, 2012).

Gambar 43. Kerangka Perbaikan Gizi dengan pendekatan multisektor



Source: The Lancet, 2013: Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition Series

Gambar berikut mengilustrasikan keterkaitan program spesifik dan sensitif gizi serta peran masing-masing sektor terkait. Pada prinsipnya peran setiap sektor dikaitkan dengan upaya untuk mengatasi penyebab langsung masalah gizi, yaitu konsumsi makanan yang cukup serta pencegahan dan penanganan infeksi (aspek kesehatan). Selanjutnya, perhatian terhadap aspek kesehatan diorientasikan pada gerakan Scaling up Nutrition (SUN) yang merupakan upaya memperkuat komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan gizi, khususnya penanganan gizi sejak 1.000 hari dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun.

Periode 1000 HPK begitu penting sehingga ada yang menyebutnya sebagai periode emas, periode sensitif, dan Bank Dunia menyebutnya sebagai “Window of Opportunity”. Maksudnya, bahwa 1000 HPK merupakan kesempatan yang sangat penting untuk meningkatkan mutu SDM generasi masa datang bergantung. Ini khususnya memberi perhatian pada kelompok sasaran seperti ibu pra-hamil (remaja perempuan) dan hamil sampai anak 0 – 2 tahun.

Gerakan 1000 HPK bukanlah inisiatif institusi, ataupun pendanaan baru tetapi gerakan ini lebih merupakan upaya meningkatkan efektivitas dari koordinasi termasuk dukungan teknis, advokasi, dan kemitraan inovatif-parisipatif dalam rangka meningkatkan status gizi, kesehatan masyarakat, dan dedikasi untuk pembangunan secara luas.

Selain aspek kesehatan sebagaimana dikenal dengan intervensi gizi spesifik, Gambar

di bawah ini juga memberikan ilustrasi akan pentingnya intervensi gizi yang bersifat sensitive, yaitu intervensi pada aspek ketahanan pangan, jaminan social, kesehatan mental ibu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pendidikan, sanitasi dan air bersih, serta pelayanan keluarga berencana. Kesemuanya akan memberikan dukungan positif dan memperkuat keberlanjutan perbaikan pangan dan gizi terutama penguatan output dihasilkan dari intervensi gizi spesifik.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dan merupakan faktor penting yang semakin mendukung pencapaian perbaikan pangan dan gizi masyarakat. Aspek lingkungan meliputi strategi advokasi, koordinasi vertikal dan horizontal, peraturan perundangan, kepemimpinan program, investasi kapasitas dan mobilisasi sumberdaya local.

Jika dilihat konsep intervensi terhadap perbaikan gizi masyarakat, intervensi pemerintah terhadap gizi terbagi menjadi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan bentuk intervensi yang secara langsung berkaitan dengan asupan gizi dan utilitas pangan. Sedangkan intervensi sensitif adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kemampuan akses pangan oleh masyarakat, kesehatan masyarakat, dan juga sanitasi lingkungan. Aspek lingkungan dan juga pengembangan SDM adalah faktor sensitif yang diperhatikan dalam pembangunan pangan dan gizi. Selanjutnya, rencana aksi ini melibatkan koordinasi dan sinkronisasi multisektor dan juga peran masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan pangan dan gizi.

Sinkronisasi dan koordinasi program lintas sektor diharapkan akan mampu meningkatkan efektifitas program dan meningkatkan kinerja pembangunan pangan dan gizi. BAPPERIDA di daerah bersama dengan Perangkat Daerah lainnya menjadi wadah sekaligus proses integrasi dan koordinasi lintas sektor ini sehingga masyarakat dengan status gizi yang baik untuk hidup sehat dan produktif dapat tercapai.

Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan dan ditujukan kepada ibu hamil serta anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan. intervensi ini hanya berkontribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penurunan stunting. Kontribusi 70% (tujuh puluh persen) lainnya berupa intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor di luar sektor kesehatan, seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk sasaran 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

Berkaitan khusus dengan upaya percepatan pencegahan stunting, berdasarkan panduan pemetaan program, kegiatan, dan sumber pembiayaan untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di Daerah dan desa maka upaya ini juga mendasarkan pada intervensi spesifik yang menasar langsung penyebab stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Intervensi gizi spesifik yang umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Terdapat 3 kelompok intervensi gizi spesifik, yaitu:

1. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
2. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.
3. Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Berikut detail intervensi gizi spesifik terkait dengan pencegahan stunting sebagaimana terdapat dalam dokumen panduan pencegahan stunting Kabupaten/Kota dan desa.

Tabel 7. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan Stunting

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Pendukung Intervensi	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Prioritas			
Ibu hamil	• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) • Pemberian suplementasi tablet tambah darah	• Pemberian suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan	• Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	• Promosi dan konseling pemberian ASI Eksklusif • Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) • Penatalaksanaan gizi buruk • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang • Pemantauan dan promosi pertumbuhan	• Pemberian supple-mentasi vitamin A • Pemberian suple-mentasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia • Pemberian imunisasi • Pemberian suple-mentasi <i>zinc</i> untuk pengobatan diare • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	• Pencegahan kecacingan
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Penting			
Remaja putri dan wanita usia subur	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah		
Anak 24-59 bulan	• Penatalaksanaan gizi buruk • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang • Pemantauan dan promosi pertumbuhan	• Pemberian suplementasi vitamin A • Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia • Pemberian supple-Balita Sakit (MTBS)	• Pencegahan kecacingan

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2025-2029.

Sedangkan intervensi gizi sensitif menasar penyebab tidak langsung stunting yang mencakup:

- peningkatan akses pangan bergizi;
- peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
- peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi.

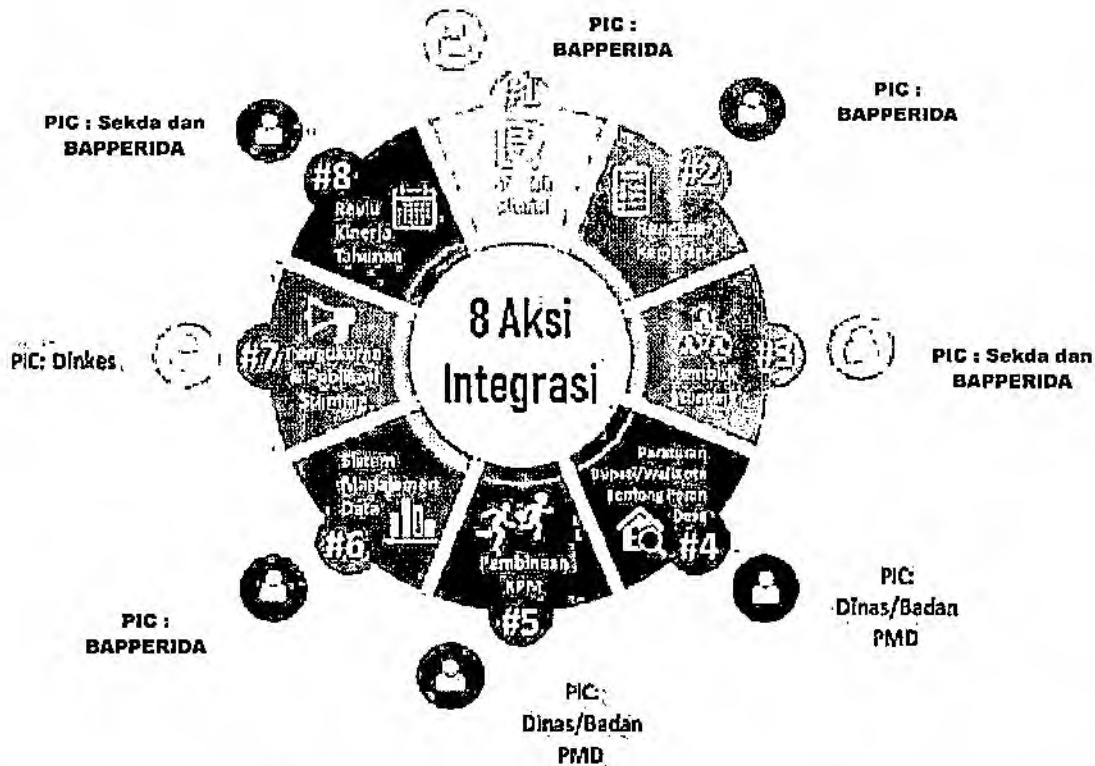
Tabel 8. Intervensi gizi sensitif percepatan pencegahan stunting

Kelompok Intervensi	Jenis Intervensi
Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	• Penyediaan akses air bersih dan air minum • Penyediaan akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan	• Penyediaan akses Jaminan Kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Penyediaan akses kepalayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) • Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	• Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak • Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	• Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) • Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) • Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng • Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2025-2029

Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan dan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program dan kegiatan intervensi gizi sensitive dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Baik intervensi sensitive maupun spesifik terkait pula dengan 8 (delapan) aksi dalam rangka pencegahan stunting. Berikut adalah gambar PIC pada masing-masing aksi percepatan penurunan stunting.



Gambar 44. Delapan Aksi Konvergensi/Integrasi dan Penanggung Jawab
 Sumber: Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Aksi 1-3, Bappenas, 2019

- Aksi 1. Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi
- Aksi 2. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- Aksi 3. Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
- Aksi 4. Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- Aksi 5. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- Aksi 6. Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
- Aksi 7. Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
- Aksi 8. Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Lamongan ini melibatkan banyak sektor (multisector approach). Sinergisme program yang bersatu dalam satu misi yaitu pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan membuka peluang untuk meningkatnya kinerja program baik masing-masing Perangkat Daerah maupun kinerja keseluruhan tim multisektor pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan.

Pengelompokan instansi pelaksana RAD-PG Kabupaten Lamongan dalam lima pilarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Klasifikasi instansi dalam kelima pilar RAD-PG

NO.	URAIAN	INSTANSI TERLIBAT
a.	Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:	
	1. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat	Dinkes, DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kominfo, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	2. Pemberian suplementasi gizi	Dinkes, Diskominfo
	3. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi	Dinkes, Diskominfo
	4. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi	Dinkes, DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinsos, Kominfo dan Dinas Perikanan
	5. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi	Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	6. Pendidikan anak usia dini	Disdik, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
b.	Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:	
	1. Produksi pangan dalam negeri	DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan
	2. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
	3. Distribusi pangan	DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan
	4. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein dan vitamin	DKPP
	5. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami	DKPP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	6. rawan pangan dan gizi	
c.	Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:	
	1. Pengawasan regulasi dan standar gizi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	2. Pengawasan keamanan pangan segar	DKPP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan
	3. Pengawasan keamanan pangan olahan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan
	4. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	umum	
	5. Promosi keamanan pangan	DKPP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
d.	Pilar 4 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:	
	1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Dinkes, Diskominfo
	2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Dinkes, Diskominfo
	3. Penyediaan air bersih dan sanitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Penerapan kawasan tanpa rokok	Dinkes, Diskominfo
	5. Penerapan perilaku sehat	Dinkes, Disdik, Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
e.	Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:	
	1. Perencanaan pangan dan gizi	Bapperida, DKPP, Dinkes, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Diskan
	2. Penguatan peranan lintas sektor	Bapperida
	3. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi	DisDukcapil
	4. Pelibatan pemangku kepentingan	Bapperida
	5. Pemantauan dan evaluasi	Bapperida
	6. Penyusunan dan penyampaian laporan	Semua pelaksana RAD-PG

3.4 Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah yang tercakup dalam tim Pelaksana RAD-PG Kabupaten Lamongan, sektor non-pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi disamping itu, melibatkan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk besinergi dalam perbaikan pangan dan gizi, serta penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Lamongan.

3.5 Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah dinas/lembaga yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada dinas/lembaga lain, di luar yang dicantumkan dalam RAD-PG ini. Tim koordinator pelaksanaan RAD-PG ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan masing-masing sebagai berikut.

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Susunan Tim Pengarah RAD-PG Kabupaten Lamongan, terdiri atas:

Penanggung Jawab : Bupati Lamongan

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Sekretaris : Kepala Bapperida Kabupaten Lamongan

Anggota :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
6. Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2. Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, yang terdiri dari:

Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Lamongan

Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Sekretaris II : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Anggota :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah RAD-PG Kabupaten Lamongan, terdiri atas:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. Menyampaikan RAD-PG kepada Gubernur Jawa Timur;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis RAD-PG Kabupaten Lamongan, terdiri atas:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;
- c. Menyampaikan draft RAD-PG ke tim pengarah untuk proses lanjut;
- d. Mensosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
- g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3.6 Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK.

2. Pedoman teknis

Setiap Perangkat Daerah dapat menerbitkan pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Pedoman teknis akan memberikan gambaran upaya pencapaian target ditentukan sehingga memberikan arahan untuk efektif dan efisiennya kegiatan dilaksanakan.

3. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Sebagai salah satu bentuk intervensi advokasi ini adalah melaksanakan kegiatan koordinasi, FGD, dan lainnya yang diperlukan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1 Indikator-indikator yang Dipantau

Selain aspek pangan dan gizi, delapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah hal yang sangat diperhatikan dalam dokumen ini.

Berikut disajikan indikator penting menjadi perhatian dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Lamongan dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tahapan konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait dengan pangan dan gizi. Instansi tersebut memiliki berbagai kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pelaksanaan RAD-PG. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut dipantau pelaksanaannya agar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Indikator yang dipantau dalam RAD-PG merupakan indikator kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10. Indikator RAD-PG Kabupaten Lamongan yang Dipantau

No	Pilar / Sub Pilar	Satuan	Indikator	Target					PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil produksi tanaman pangan								
		kcal/Kap/hari	Angka Ketersediaan Energi	2200	220	220	2200	2200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		kcal/Kap/hari	Angka Ketersediaan Protein	57	57	57	57	57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Produksi Pertanian	73,49	74,21	75,07	75,78	76,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Produksi Perikanan (ton)	64,797,08	65,265,49	65,577,77	66,391,84	67,265,49	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Produktivitas padi	8	9	10	11	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Produktivitas Jagung	4	5	6	7	8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Produksi Kedelai	1,50	2	2,50	3	3,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Persentase peningkatan produktivitas tanaman kacang hijau	2,40	2,75	3	3,25	3,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Persentase peningkatan produktivitas kacang tanah	2,50	2,75	3	3,25	3,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	PPH Ketersediaan	88,6	88,8	90	90,2	90,4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Perbaikan Gizi Masyarakat								
		%	Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	76,86	77,86	78,86	79,86	80,86	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

No	Pilar / Sub Pilar	Satuan	Indikator	Target					PD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
		%	Prevelensi stunting	5,3	4,3	3,3	2,3	1	Dinas Kesehatan
		%	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	108,77	109,23	109,77	110,23	110,77	Dinas Kesehatan
		%	Prevelensi anemia pada ibu hamil	22,67	22,33	21,67	21,33	20,67	Dinas Kesehatan
		%	Persentase dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	Dinas Kesehatan
		%	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		%	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	13,57	11,77	9,57	8,57	7,77	Dinas Kesehatan
		Unit	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	33 PKM	33 PKM	33 PKM	33 PKM	33 PKM	Dinas Kesehatan
		%	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	70.52	70.54	70.56	70.58	70.60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	22.26	22.28	22.30	22.32	22.34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		%	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	65	66	67	68	69	Dinas Kesehatan

Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

No	Pilar / Sub Pilar	Satuan	Indikator	Target					OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan								
		%	Mangga	1,25	1,50	1,75	2	2,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Melon	1,75	2	2,25	2,50	2,75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Semangka	1,75	2	2,25	2,50	2,75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Pepaya	1,25	1,50	1,75	2	2,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Pisang	1,25	1,50	1,75	2	2,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Blewah	1,75	2	2,25	2,50	2,75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Populasi Ternak								
		%	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Sehat	11.16	12.70	14.27	15.27	16.27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

		%	Prosentase Ternak Unggas Yang Sehat	1.89	2.15	2.44	4.48	8.96	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Peningkatan Pemenuhan Produksi Telur								
		Ton	Ayam petelor	5.074,6	6.452,7	5.457,7	5.176,1	6.581,7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Ton	Ayam Kampung	514,9	842,0	860,6	1.235,8	525,2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Penguatan Pemenuhan Produksi daging keseluruhan ternak								
		Kg	Pemenuhan Produksi daging Sapi	5.278.512,0	5.384.082,2	5.491.763,8	5.601.599,1	5.713.631,1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kg	Pemenuhan Produksi Daging Kambing	765.472	780.782	796.398	812.326	828.572	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kg	Pemenuhan produksi Daging Kerbau	1.614,8	1.384,3	1.631,0	1.398,1	1.647,3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Penguatan Produksi perikanan								
		%	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan	53.33	66.67	80	93.35	100	Dinas Perikanan
		Ton	Perikanan tangkap	142.338,4	81.632,6	81.773,7	79.423,0	145.185,2	Dinas Perikanan
		Ton	Pengelolaan Ikan	92.743,57	93.671,01	94.607,72	95.535,16	96.462,60	Dinas Perikanan
		Ton	Produksi Perikanan Budidaya	64.009,95	65.277,37	65.290,15	66.582,92	66.595,95	Dinas Perikanan
6	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha								
		%	Persentase Koperasi yang Sehat	10	10,50	11	11,50	12	Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		%	Program pemberdayaan Usaha	2.00	2.50	3.00	3.50	4	Dinas Kesehatan dan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		%	SDM Koperasi Yang Bersertifikat	16	19	22	25	28	Dinas Kesehatan dan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.12	2.15	2.20	2.25	2.30	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

		%	Program Pengelola an Sistem Informasi Industri Nasional	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		%	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	78	80	82	84	86	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		%	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	52	53	54	55	56	Dinas Kesehatan
7	Program Penanggu langan Bencana								
		%	Program Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	BPBD

Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi

No	Pilar / Sub Pilar	Satuan	Indikator	Target					OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pemanfaatan Pangan dan Gizi								
		kcal/Kap /hari	Konsumsi energi perkapita	2200	2200	2200	2200	2200	Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kkal/Kap/ Hari	Konsumsi protein perkapita	57	57	57	57	57	Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Persentase Beras yang aman	455. 21	458.2 1	461. 21	464. 21	467. 21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	75.0 0	87.50	87.5 0	97.5 0	100	Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	PPH Konsumsi	89,6	89,8	90	90,2	90,4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		%	Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	75.0 0	87.50	87.5 0	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pembinaan Kesehatan Masyarakat								
		%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35	41	46	51	56	Dinas Kesehatan
		%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

No	Pilar / Sub Pilar	Satuan	Indikator	Target					OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Penguatan Kelembagaan								
		%	Meningkatkan Pemberdayaan Gender (Indeks)	74,0 1	74,0 3	74,0 5	74,7 7	74,7 9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ber-KB	77.8 1	77.8 2	77.8 3	77.8 4	77.8 5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Rakor	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam upaya penganggulangan Stunting	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Orang	Jumlah petugas Gizi Kab/Kota	96	96	96	96	96	Dinas Kesehatan
		%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	52	53	54	55	56	Dinas Kesehatan
		%	Program Pengendalian Penduduk	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	16.8 8	18.9 9	21.1 0	23.6 6	25.7 7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Program Perlindungan Khusus Anak	60	65	70	75	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	76	78	80	82	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		%	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96	98	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		%	Program Pendaftaran Penduduk	98,3 0	98,4 0	98,5 0	98,6 0	98,7 0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		%	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,9 0	98,9 0	99,0 6	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah	Lumbung pangan	30	35	40	45	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Terdapat banyak lembaga di tingkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam rencana aksi daerah pangan dan gizi. Masing-masing dengan program yang dimilikinya terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Timur. Penganggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur juga disampaikan dalam dokumen ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan pangan dan gizi masyarakat.

4.1.1 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi di Kabupaten Lamongan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara/interview dengan terhadap key informan dari dinas-dinas terkait yang dapat memberikan informasi penting dalam penyusunan sasaran dan rencana aksi pangan dan gizi.

Focus Group Discussion (FGD) adalah metode terbaik untuk mengumpulkan pendapat-pendapat penting terkait pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan. Termasuk di dalamnya adalah memberikan konfirmasi langsung terkait dengan indikator-indikator digunakan sebagai input, proses dan output RAD-PG Kabupaten Lamongan.

Masing-masing indikator, baik input, proses, dan output, memiliki indikator-indikator dan target capaian. Indikator dan target capaian masing-masing diisi oleh OPD-OPD terkait di Kabupaten Lamongan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Koordinasi atas indikator dan target capaiannya merupakan bagian dari kegiatan Bapperida Kabupaten Lamongan. Pertemuan koordinasi pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dialami masing-masing OPD dalam mencapai target yang direncanakan dan atau merupakan forum untuk menjaga komunikasi kerjasama program lintas sector terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

4.1.2 Metode Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan setelah tahap kompilasi dan pengolahan data adalah melakukan analisa terhadap hasil identifikasi yang diperoleh berdasarkan pada teori dan standar perencanaan maupun peraturan-peraturan yang mendukung analisa tersebut. Analisis data yang digunakan dalam kajian ini berupa analisis deskriptif dan juga statistik deskriptif untuk menjelaskan kondisi existing dan juga tantangan pembangunan gizi di Kabupaten Lamongan

Pendeskripsian dilakukan sesuai dengan aspek dipertimbangkan dalam pembangunan pangan dan gizi, meliputi:

1. Situasi gizi masyarakat. Gizi masyarakat yang baik tercermin dari kondisi bayi dan balita lahir karena kelompok masyarakat ini sangat rentan terhadap kualitas asupan makanan (gizi). Situasi gizi masyarakat di Kabupaten Lamongan akan terlihat dari tinggi rendahnya proporsi balita yang memiliki masalah dengan berat badan dan tinggi badan.
2. Aksesibilitas pangan. Aksesibilitas pangan dapat digambarkan dari produksi pangan di Kabupaten Lamongan, yakni tanaman pangan dan pangan hewani (daging, telur dan ikan). Kondisi tingkat kemiskinan di daerah juga menjadi bagian penting menjelaskan daya beli dalam rangka akses pangan di Kabupaten Lamongan.
3. Mutu dan keamanan pangan. Pangan yang aman dan bermutu dicerminkan oleh makin sedikitnya jumlah kasus keracunan makanan di suatu wilayah. Oleh sebab itu, deskripsi terhadap mutu dan keamanan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi

jumlah kejadian luar biasa berupa kasus keracunan makanan.

4. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS digambarkan dengan Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Lamongan. Semakin tinggi proporsinya maka semakin baik kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan. Indikator PHBS adalah perilaku cuci tangan, pemberian ASI eksklusif, rumah tangga memanfaatkan posyandu, penggunaan alat kontrasepsi (Keluarga Berencana), aktivitas fisik, penduduk usia di atas 10 tahun yang merokok, penduduk di atas usia 10 tahun yang kurang makan sayur dan buah, akses terhadap sanitasi layak dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

4.2 Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan

Waktu pemantauan dilaksanakan minimal setahun atau dua kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. 3 (tiga) tahapan koordinasi ini selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemantauan Awal Pelaksanaan Program

- a. Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis di dalam RAD-PG dengan kondisi riil di lapangan;
- b. Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD-PG;
- c. Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang:
 - 1) strategi pencapaian tujuan;
 - 2) kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih; serta
 - 3) kendala yang akan datang.
- d. Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi RAD-PG

2. Pemantauan Pertengahan Pelaksanaan Program

- a. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada pertengahan implementasi melalui:
 - 1) OPD terkait
 - 2) Stakeholders
- b. Melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai
- c. Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai

4.3 Pelaporan Hasil Pemantauan

Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Pendahuluan

- a. Tujuan monev

- b. Permasalahan dan program kerja per tahun dicanangkan
- 2. Indikator dan capaian masing-masing Perangkat Daerah
- 3. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
- 4. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya
- 5. Penutup

4.4 Indikator-indikator yang Dievaluasi

Indikator yang dievaluasi adalah indikator capaian RAD-PG. Indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Gizi Masyarakat
 - a. Prevalensi Balita Gizi Kurang;
 - b. Balita Gizi Buruk;
 - c. Balita Stunting;
 - d. Angka Kematian bayi B (/1000 kelahiran hidup);
 - e. Prevalensi ASI Eksklusif;
 - f. Prevalensi Anemia ibu hamil;
 - g. Angka kelahiran hidup (1/100.000 Kelahiran Hidup);
 - h. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun;
 - i. Akses UCI (Universal Child Immunization);
 - j. Prevalensi Balita Kurus;
 - k. Berat Badan Lahir Rendah.
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
 - a. Ketersediaan Energi;
 - b. Ketersediaan Protein;
 - c. Ketersediaan Produksi pangan utama (beras) thd konsumsi;
 - d. Produksi padi;
 - e. Produksi Jagung;
 - f. Produksi Kedelai;
 - g. Produksi Gula;
 - h. Produksi Daging Sapi;
 - i. Produksi Ikan;
 - j. Produksi Garam;
 - k. Angka Kecukupan Energi;
 - l. Angka Kecukupan Protein;
 - m. Pola Pangan Harapan;
 - n. Kerawanan pangan masyarakat;
3. Peningkatan pengawasan Mutu dan keamanan pangan
 - a. Jumlah orang difasilitasi uji produk;
 - b. Jumlah orang mengikuti sertifikasi halal K-UKM;
 - c. Jumlah promosi / advokasi gerakan konsumsi B2SA;
 - d. Jumlah Pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 - e. Jumlah Promosi Keamanan Pangan;
 - f. Bimbingan Teknis Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - g. Jumlah makanan yang disampling dan diuji laboratorium;

- h. Jumlah kunjungan Tim Mobil Laboratorium Keliling;
 - i. Jumlah Kabupaten yang dilakukan pembinaan IRTPnya;
 - j. Jumlah desa yang dibina agar masyarakat memahami keamanan pangan;
 - k. Jumlah pasar yang dibina agar petugas pasar dapat mengawasi peredaran bahan berbahaya maupun pangan mengandung bahan berbahaya;
 - l. Jumlah masyarakat yang diberikan KIE tentang Obat dan Makanan;
 - m. Jumlah Kelompok yang menerapkan *good farming practice*;
 - n. Surat keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan;
 - o. Jumlah rekomendasi pendaftaran pakan yang bersertifikat;
 - p. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pengolahan pakan;
 - q. Jumlah sampel pakan yang diuji;
 - r. Jumlah kelompok/pelaku usaha yang menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - s. Jumlah kelompok terbina investasi/akses permodalan;
 - t. Jumlah kelompok peternak berprestasi;
 - u. Jumlah usaha produk hewan tersertifikasi NKV;
 - v. Jumlah RPH tersertifikasi NKV;
 - w. Jumlah hasil pengujian produk hewan;
 - x. Jumlah pelaku usaha yang menerapkan CPPIB;
 - y. Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan yang terbina kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - z. Persentase peningkatan produk olahan UPI yang bersertifikat;
 - aa. Jumlah stakeholder terakses informasi penguatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha;
 - bb. Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sarana pengolahan produk hasil perikanan;
 - cc. Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tervalidasi;
 - dd. Jumlah pelaku usaha terakses informasi perluasan akses pasar, promosi dan logistik;
 - ee. Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sarana pemasaran hasil perikanan;
 - ff. Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan;
 - gg. Sosialisasi Gemarikan Untuk Mencegah Stunting;
 - hh. Jumlah pelaku usaha tekakses informasi jaminan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
 - ii. Jumlah unit usaha terstandarisasi jaminan mutu;
 - jj. Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Perikanan;
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
- a. Jumlah rumah tangga menerapkan PHBS;
 - b. Cakupan pelayanan akses sanitasi;
 - c. Cakupan pelayanan akses air minum;
 - d. Orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan;
 - e. Penanganan kawasan permukiman kumuh;

5. Penguatan kelembagaan pangan dan Gizi

- a. Frekuensi pertemuan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan;
- b. Jumlah Penyebaran Informasi melalui media cetak;
- c. Jumlah Penyebaran Informasi melalui media elektronik;
- d. Jumlah Penyebaran Informasi melalui media luar ruangan;
- e. Jumlah Bakorwil dalam program capacity building kader remaja;

4.5 Waktu dan Pelaksana Evaluasi

Waktu evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator target capaian RAD-PG setiap akhir periode sehingga keberhasilan pencapaian target setiap tahun dapat nilai.

4.6 Pelaporan Hasil Evaluasi

Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program dilaporkan dalam kegiatan koordinasi dengan OPD terkait untuk:

- a. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir implementasi melalui:
 1. OPD terkait;
 2. Stakeholders;
- b. Mengidentifikasi arah pengembangan selanjutnya di PD terkait
- c. Menggali informasi pada:
 1. Indikator capaian;
 2. Kendala dan masalah serta solusinya;
- d. Melihat usaha-usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh PD terkait.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan pangan dan gizi baik secara spesifik maupun sensitive merupakan upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah yang sinergis dengan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029, dilakukan dengan pendekatan multisector untuk menghasilkan dampak yang diharapkan, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan produktif bagi pembangunan. Ini merupakan komitmen bersama dalam menyukseskan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan memperkuat pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Aspek kesehatan memang menjadi focus utama untuk melihat output dari intervensi pemerintah di aspek pangan dan gizi, seperti penurunan stunting, penurunan balita gizi buruk, penurunan AKI, AKB, peningkatan capaian angka harapan hidup, serta indikator-indikator penting lainnya seperti peningkatan PPH, peningkatan IPM, dan peningkatan AHH. Namun demikian, disadari bahwa aspek lain juga memberikan pengaruh yang signifikan pula, seperti kinerja pertanian tanaman pangan, efektifitas pembangunan infrastruktur wilayah, dan juga aspek-aspek edukasi masalah pangan dan gizi sejak dini di bangku sekolah. Semua aspek ini dipadukan dalam rangka pembangunan pangan dan gizi dari multi-sektornya.

Dokumen ini telah disusun dengan kontribusi dari berbagai perangkat daerah terkait. Namun demikian, dokumen ini tentunya terbuka atas masukan-masukan perbaikan ke depan untuk pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan yang lebih baik.

5.2. SARAN/HARAPAN

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Lamongan diharapkan dijadikan sebagai acuan mewujudkan tujuan memperkuat Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Lamongan. RAD-PG ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan situasi dan perencanaan program/kegiatan pangan dan gizi di Kabupaten Lamongan sehingga mampu menerapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal dan mampu membangun dan memfungsikan kelembagaan pangan dan gizi secara optimal serta mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi secara baik dan efektif.



BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFFENDI